



2020

LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAHAN
(LKIP)



**KECAMATAN CIBIRU
KOTA BANDUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh S.W.T. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada saat ini kami telah dapat menyampaikan evaluasi mengenai pelaksanaan kebijakan kegiatan program prioritas dibidang pemerintahan, pelaksanaan bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan dalam mengukur keberhasilan kinerja selama tahun 2020 pada unit organisasi Kantor Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam bentuk “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020”.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari salah satu tugas dan Kewajiban Camat dalam melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan batasan kewenangan yang telah dilimpahkan (didelegasikan) oleh Wali Kota kepada Camat dan tugas serta fungsi Kecamatan sebagai lembaga teknis kewilayahan unsur pendukung pelaksana kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik dan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, diantaranya mensukseskan implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi program prioritas Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan jaman.

Kami menyadari bahwa penyampaian dan pemaparan materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna, sehingga saran pendapat yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mambantu dalam proses penyusunan laporan ini, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin.

CAMAT CIBIRU,



Drs. DIDIN DIKAYUANA, M.Kesos.

Pembina /IV.a

NIP. 19661027 199301 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Kecamatan Cibiru.....	3
1.3 Tugas dan Fungsi.....	5
1.4 Isu Strategis.....	8
1.5 Landasan Hukum.....	14
1.6 Sistematika.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu.....	17
2.1.1 Rencana Strategis.....	17
2.1.2 Visi.....	18
2.1.3 Misi.....	19
2.1.4 Tujuan dan Sasaran.....	19
2.1.5 Indikator Kinerja Utama.....	21
2.1.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	36

2.2	Perencanaan Strategis Hasil Reviu.....	37
2.2.1	Rencana Strategis Hasil Reviu.....	38
2.2.2	Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu.....	40
2.2.3	Perjanjian Kinerja Hasil Reviu.....	57
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....		58
3.1	Kerangka Pengukuran Kinerja.....	59
3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama.....	62
3.3	Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	64
BAB IV PENUTUP.....		119

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

LAMPIRAN

1. Lampiran Kinerja Nyata
2. Lampiran kealisasi Keuangan
3. Lampiran Dokumen Perjanjian Kinerja



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Cibiru selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.



Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Cibiru Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



1.2 Gambaran Umum Kecamatan Cibiru

Kecamatan Cibiru merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung. Batas wilayah dan jumlah kelurahan di Kecamatan Cibiru pertama kali ditetapkan berdasarkan pada PP Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dimana batas Kecamatan Cibiru adalah sebagai berikut :

- a. Bagian Selatan : Kecamatan Panyileukan Kota Bandung
- b. Bagian Utara : Kecamatan Cilengkrang Kab. Bandung
- c. Bagian Timur : Kecamatan Cileunyi Kab. Bandung
- d. Bagian Barat : Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

Dan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung ditetapkan juga kelurahan di masing-masing kecamatan se-Kota Bandung. Di dalam Perda tersebut disebutkan bahwa Kecamatan Cibiru terdiri dari 4 Kelurahan yaitu :

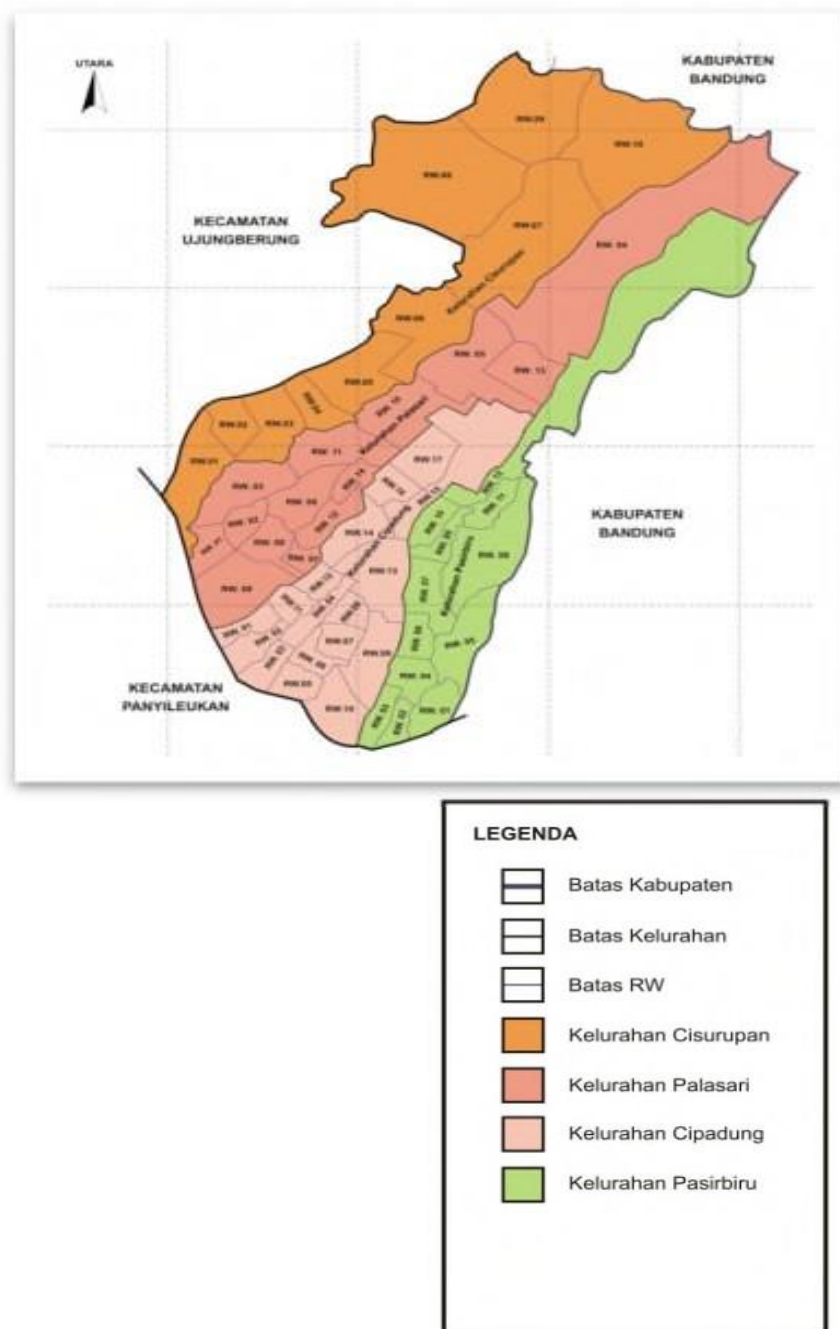
1. Kelurahan Palasari;
2. Kelurahan Cipadung;
3. Kelurahan Pasir Biru;
4. Kelurahan Cisurupan.

Luas wilayah Kecamatan Cibiru sebesar 652,930 Ha atau 6,5 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak sebanyak 72.010 jiwa dan 21.561



Kecamatan Cibiru

Kepala Keluarga (KK). Untuk kepentingan administrasi kependudukan 4 (empat) Kelurahan tersebut terdiri dari 53 Rukun Warga, dan 283 Rukun Tetangga. Sebagian besar wilayah Kecamatan Cibiru terdiri dari pemukiman. Sedangkan kegiatan ekonominya didominasi oleh jasa perdagangan.





1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Cibiru mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelayanan publik; dan
3. Pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut :

▪ **Camat**

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;



4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Cibiru dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 - a. Sub bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi
 - b. Sub bagian Program dan Keuangan
2. Seksi-seksi sebagai unsur Lini terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Keamanan dan Ketertiban
 - c. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Lurah, membawahi
 - a. Sekretaris Kelurahan
 - b. Seksi Pemerintahan
 - c. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan



▪ **Sekretaris Camat**

Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan.

▪ **Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi**

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.

▪ **Sub Bagian Program dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup program dan keuangan.

▪ **Seksi Pemerintahan**

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pemerintahan.

▪ **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban**

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman dan ketertiban.

▪ **Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.

▪ **Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

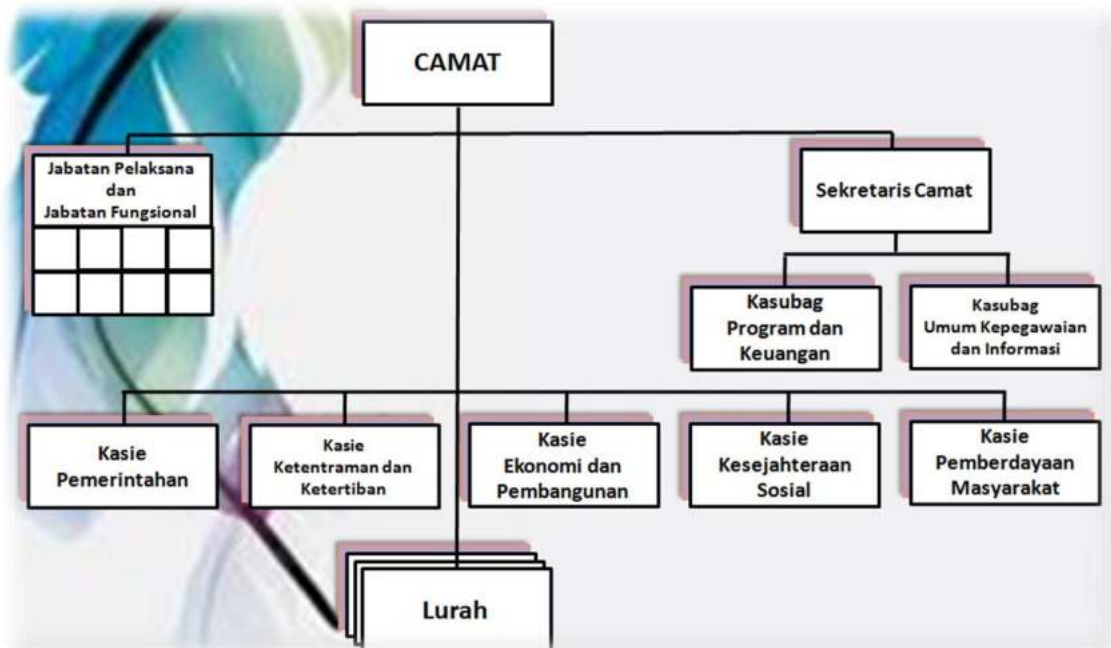
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan pembangunan.

▪ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.



Struktur Kecamatan Cibiru



1.4 Isu Strategis

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, khususnya Pemerintahan Kecamatan Cibiru Kota Bandung terdapat permasalahan yang menjadi Isu Strategis salah satunya berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), seperti diketahui bersama bahwa Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan



Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas : Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang PU dan PR, Bidang Perumahan, Bidang Perhubungan, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang PP & PA, Bidang KB & KS, Bidang Sosial, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Kesenian, Bidang Pemerintahan dalam negeri, Bidang Komukinasi dan informasi, Bidang Ketahanan Pangan, dan Bidang Penanaman Modal.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan : Pengumpulan data, Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Laporan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Berikut contoh laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.



SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi dan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Hal ini selaras dengan program kegiatan yang diselenggarakan di Kecamatan Cibiru yaitu pembentukan Satwankar kelurahan dan pembentukan Kampung Siaga Bencana (Kagana).

Perencanaan pembangunan kewilayahan juga perlu memperhatikan Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs merupakan komitmen negara-negara anggota PBB dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan hingga tahun 2030. Komitmen ini berlaku bagi negara-negara yang tergabung dalam PBB termasuk bagi negara maju yang syarat akan pemanfaatan teknologi, sehingga bumi ini terselamatkan dari dampak pembangunan. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan diantaranya adalah : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun; Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan; Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh



Penduduk Semua Usia; Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua; Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan; Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua; Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua; Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua; Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi; Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara; Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan; Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya; Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan; Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati; Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan; dan Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.



Secara umum pembangunan berkelanjutan terbagi atas empat pilar, diantaranya adalah Pembangunan Sosial SDGs yaitu tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat; Pembangunan Lingkungan SDGs yaitu tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan; Pembangunan Ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; serta Pembangunan Hukum dan Tata Kelola SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Terhadap keterkaitan rencana pembangunan dengan SDGs ini Kecamatan Cibiru nampaknya memiliki keselarasan yaitu dengan tujuan Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi, hal ini seiring dengan dilaksanakannya program pemberdayaan masyarakat dan program pembangunan yang dapat mengungkit peningkatan capaian indeks kepuasan masyarakat.

Selain itu, keterkaitan pembangunan kewilayahan juga perlu memperhatikan indikator pembangunan manusia/ indeks pembangunan manusia (IPM). IPM adalah salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Indikator atau dimensi dasar dimaksud diantaranya adalah Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Standar



Hidup Layak. Antara angka indeks yang satu dengan yang lain tidak berdiri sendiri tetapi akan saling terkait. Komponen indeks kesehatan dilihat dari angka harapan hidup, komponen pengetahuan dilihat dari rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak dapat dilihat dari pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Terkait dengan program pembangunan yang dilaksanakan pada kecamatan, karena kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bukan sebagai pelaksana teknis urusan melainkan sebagai pelaksana tugas sebagian kewenangan yang diberikan Wali Kota Kepada Camat maka dalam hal ini kecamatan mengambil peran membantu tugas Dinas selaku organisasi pelaksana teknis urusan tentu sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan. Hal ini dapat dilihat pada upaya peningkatan angka harapan hidup dimana kewilayahan dapat melaksanakan sebagian kewenangannya dalam membantu tugas teknis dinas melalui gerakan Posyandu. Dalam hal membantu tingkat pengetahuan masyarakat yang dalam hal ini diwujudkan oleh rata-rata lama sekolah, perannya dapat dilakukan oleh PKK yang merupakan bagian dari Lembaga Kesuadayaan Kelurahan (LKK), dimana kegiatan yang biasanya dilakukan adalah melakukan sosialisasi peningkatan kualitas hidup keluarga. Sedangkan standar hidup layak, dapat dilakukan oleh ketiga LKK melalui kegiatan peningkatan keterampilan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui program yang ada di kecamatan dan kelurahan.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan



pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Cibiru Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Tahunan. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahunan yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.5 Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

2.1.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Cibiru Nomor : 019/SK-Kec.Cbu Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis



Kecamatan Cibiru Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Cibiru Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.2 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan



potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019-2023 adalah :

“ Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis ”

2.1.3 Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
- b. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

2.1.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan



sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Cibiru Tahun 2019-2023 sebanyak 3 (Tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Cibiru Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	80	82.21	81	81	81
		Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	50	50	50	75	100
2	Optimalisasi Tingkat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan	60	65	80	81	81.50



	Pemberdayaan Masyarakat		Lembaga Kemasyarakatan					
--	-------------------------	--	------------------------	--	--	--	--	--

2.1.5 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Cibiru Nomor : 019/SK-Kec.Cbu Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cibiru Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	Nilai	Merupakan Tugas dan Fungsi OPD dengan menggunakan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul di bawah ini : 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) - Ada kepengurusan - Ada program kerja	Kriteria Kelurahan Unggul : memenuhi/me laksanakan minimal 5 dari 12 jenis kondisi



					<ul style="list-style-type: none">- Mengikuti pelatihan- Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang- Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat <p>2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)</p> <ul style="list-style-type: none">- Ada Kepengurusan- Gardu Sosial- Lumbung social- Peta Rawan Bencana- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana	
--	--	--	--	--	--	--



					<p>3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none">- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca- Memiliki koleksi buku dange; 30 exp- Koran2 / majalah langganan kelurahan- Ada laporan pengunjung <p>4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah</p> <ul style="list-style-type: none">- petunjuk arah ke masjid- ada Peningat /himbauan sholat berjamaah/alrm waktu sholat <p>5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none">- SK / SP	
--	--	--	--	--	---	--



					<ul style="list-style-type: none">- Ada Program Kerja- Monitoring Rawan Jentik- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan perminggu- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) <p>6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan perkelurahan (PM)- Data terpilah</p> <ul style="list-style-type: none">- SatgasPengarusutamaan gender (PUG)- Pelatihan pelatihan- Perlindungan bagi perempuan (KDRT) <p>7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak perkelurahan (tempat bermain anak) (PM)</p>	
--	--	--	--	--	--	--



					<ul style="list-style-type: none">- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK- Memiliki data anak- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA- Monitoring dan evaluasi <p>8. Septic Tank Komunal (Ekbang)</p> <ul style="list-style-type: none">- Minimal untuk 5 rumah- Jarak dengan sumber air bersih dange; 11 meter- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga- Menggunakan pipa paralon	
--	--	--	--	--	--	--



					<p>- Menggunakan bak control</p> <p>9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)</p> <p>- Anggota Koperasi dange; 20 orang</p> <p>- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas</p> <p>- Memiliki Akte Pendirian</p> <p>- Ada usaha simpan pinjam</p> <p>11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)</p> <p>Kriteria :</p>	
--	--	--	--	--	---	--



					<p>a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan</p> <p>b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan</p> <p>c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan</p> <p>d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan ambblas</p> <p>e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering</p>	
--	--	--	--	--	---	--



					f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau 12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART	
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% Rata rata RW Unggul + LKK Unggul + Siskamling Aktif	% RW Unggul (Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan 7 dari 16 Kriteria RW Unggul) meliputi : Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat : 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter



						<p>skala rumah tangga</p> <p>2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah</p> <p>3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R</p> <p>4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester</p> <p>5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS</p> <p>Kriteria RW</p>
--	--	--	--	--	--	--



Kecamatan Cibiru

						<p>Unggul, terdapat minimal melaksanakan / terdapat 7 dari 16 jenis kondisi dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Satu Kampung Satu Taman Bermain;2. Balai RW/Markas Karang Taruna;3. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Ke capi Suling, perguruan silat,Rebana/ Tagoni dll)4. Biopori/Su mur resapan tiap rumah dan jalan/gang;5. Gapura Kujang;6. Satu Kampung Satu Produk;
--	--	--	--	--	--	--



							<ol style="list-style-type: none">7. Kampung Berkebun;8. Kampung Caang Baranang;9. MCK komunal;10. Pavingisasi11. Gerakan satu rumah satu tanaman;12. Movie on the move (Layartancep)/ Nonton Bareng13. Media Kampanye Kampung Unggul14. Satu Rumah satu jumantik15. Laporan RW tepat waktu minimal form A : a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5)
--	--	--	--	--	--	--	---



						<p>b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C)</p> <p>c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni</p> <p>16. RW berdaya</p> <p>a. Ada kepengurusan</p> <p>b. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf)</p> <p>Adanya kegiatan sosial yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf)% LKK Unggul</p> <p>Kriteria LKK Aktif :</p>
--	--	--	--	--	--	---



						<p>1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK (Kecamatan/Kelurahan)</p> <p>2. Minimal 60% Ketua / Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan</p> <p>3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/ke</p>
--	--	--	--	--	--	--



						<p>lurahan melaksanakan minimal 75% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan Aktif mengikuti kegiatan / lomba/kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan dalam satu tahun%</p> <p>Siskamling RW Aktif</p> <p>Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Adanya Pengurus2. Adanya Kelompok Siskamling3. Adanya Jadwal Siskamling4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling
--	--	--	--	--	--	--



						Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
--	--	--	--	--	--	--

2.1.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Kecamatan Cibiru Kota



Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	82.21
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	50
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	75

2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.



Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibiru yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cibiru Tahun 2020, sebagai berikut :

2.2.1 Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan Cibiru terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Tahun 2020

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan Cibiru di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Berdasarkan Reviu Pemetaan Kinerja Tanggal 02 Juli 2019

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Tahun 2020 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Cibiru Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	Nilai	80	82.21	81	81	81
		Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	50	75	100
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	60	65	80	81	81.50



2.2.2 Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cibiru serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cibiru hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITEIA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	Nilai	Merupakan Tugas dan Fungsi OPD dengan menggunakan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan		9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan,	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan	% kelurahan yang memenuhi kriteria		Kriteria Kelurahan Unggul : memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 12 jenis kondisi



Kecamatan Cibiru

	Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan			dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	kelurahan unggul di bawah ini : 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) - Ada kepengurusan - Ada program kerja - Mengikuti pelatihan - Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang - Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat		
--	---	--	--	---	--	--	--



Kecamatan Cibiru

					<p>2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)</p> <ul style="list-style-type: none">- Ada Kepengurusan- Gardu Sosial- Lumbung social- Peta Rawan Bencana- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana <p>3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)</p> <ul style="list-style-type: none">- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca- Memiliki koleksi buku dange; 30		
--	--	--	--	--	--	--	--



Kecamatan Cibiru

					<p>exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung 4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah - petunjuk arah ke masjid - ada Pengingat /himbauan sholat berjamaah/alrm waktu sholat 5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--



Kecamatan Cibiru

					<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan perminggu- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) <p>6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan perkelurahan (PM)</p> <ul style="list-style-type: none">- Data terpilah- Satgas Pengarusutamaan gender (PUG)- Pelatihan pelatihan- Perlindungan bagi perempuan (KDRT) <p>7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



Kecamatan Cibiru

					<p>per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi 8. Septic Tank Komunal (Ekbang) - Minimal untuk 5 rumah</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



Kecamatan Cibiru

					<ul style="list-style-type: none">- Jarak dengan sumber air bersih dange; 11 meter- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga- Menggunakan pipa paralon- Menggunakan bak kontrol <p>9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)</p> <p>10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--



Kecamatan Cibiru

					<ul style="list-style-type: none">- Anggota Koperasi dange; 20 orang- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas- Memiliki Akte Pendirian- Ada usaha simpan pinjam <p>11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)</p> <p>Kriteria :</p> <p>a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--



Kecamatan Cibiru

					<p>b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan</p> <p>c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan</p> <p>d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblas</p> <p>e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--



Kecamatan Cibiru

					daun atau ranting kering f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau 12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART		
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% Rata rata RW Unggul + LKK Unggul + Siskamling Aktif	% RW Unggul (Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan 7 dari 16 Kriteria RW Unggul) meliputi : Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat : 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola	



Kecamatan Cibiru

							<p>Komposter skala rumah tangga</p> <ol style="list-style-type: none">2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS Kriteria RW Unggul, terdapat minimal melaksanakan / terdapat 7 dari 16 jenis kondisi dibawah ini :
--	--	--	--	--	--	--	--



Kecamatan Cibiru

							<ol style="list-style-type: none">1. Satu Kampung Satu Taman Bermain;2. Balai RW/Markas Karang Taruna;3. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling, perguruan silat, Rebana/Tagoni dll)4. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang;5. Gapura Kujang;6. Satu Kampung Satu Produk;7. Kampung Berkebun;8. Kampung Caang Baranang;9. MCK komunal;10. Pavingisasi11. Gerakan satu rumah satu tanaman;
--	--	--	--	--	--	--	---



Kecamatan Cibiru

							<p>b. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf) Adanya kegiatan sosial yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf) % LKK Unggul Keriteria LKK Aktif :</p> <p>1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/ agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK (Kecamatan/Kelurahan)</p> <p>2. Minimal 60% Ketua / Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam</p>
--	--	--	--	--	--	--	--



Kecamatan Cibiru

							<p>pembahasan musrenbang Kecamatan</p> <p>3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 75% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan Aktif mengikuti kegiatan / lomba/kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan dalam satu tahun %</p> <p>Siskamling RW Aktif Kriteria Siskamling Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Adanya Pengurus2. Adanya Kelompok Siskamling3. Adanya Jadwal Siskamling4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling Apabila ada
--	--	--	--	--	--	--	---



Kecamatan Cibiru

							kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)
--	--	--	--	--	--	--	--



2.2.3 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cibiru hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Camat Cibiru dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	Nilai	82.21
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Cibiru Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Cibiru.



3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :



Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Cibiru Kota Bandung
Tahun 2020**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Dark Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Orange
4	Kurang	50.00 – 64.99	Yellow
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan



mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Cibiru Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibiru Tahun 2020, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cibiru berdasarkan Keputusan Camat Cibiru Kota Bandung Nomor : 019/SK-Kec.Cbu Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Cibiru Kota Bandung, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator



3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Cibiru Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Camat Cibiru Kota Bandung Nomor : 019/SK-Kec.Cbu Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Cibiru Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

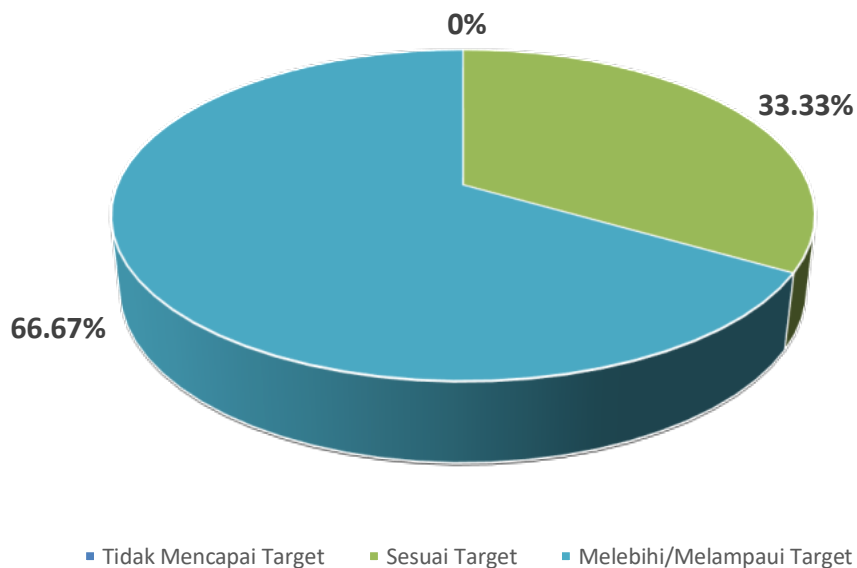
Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Cibiru Kota Bandung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Cibiru Kota Bandung
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	Nilai	82.21	83.35	101.39
2	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	100.00
3	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75	76.20	106.46

Diagram 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cibiru
Kota Bandung Tahun 2020





Dari tabel dan Diagram tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru, dengan capaian kinerja 101.39 %, pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dengan capaian kinerja 106.46 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Kelurahan Unggul, dengan capaian kinerja 100 %.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Strategis

Secara umum Kecamatan Cibiru Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Cibiru, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Cibiru Kota Bandung adalah sebagai berikut:



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	Nilai	82.21	83.35	101.39
2	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	100.00
3	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75	79.85	106.46

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	66.67 %
2	Sesuai Target	33.33 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %



Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00
2	Misi 2	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	3	2	66.67	1	33.33	0	0.00

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	50.00 %
2	Sesuai Target	1	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Misi 2	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.



- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**

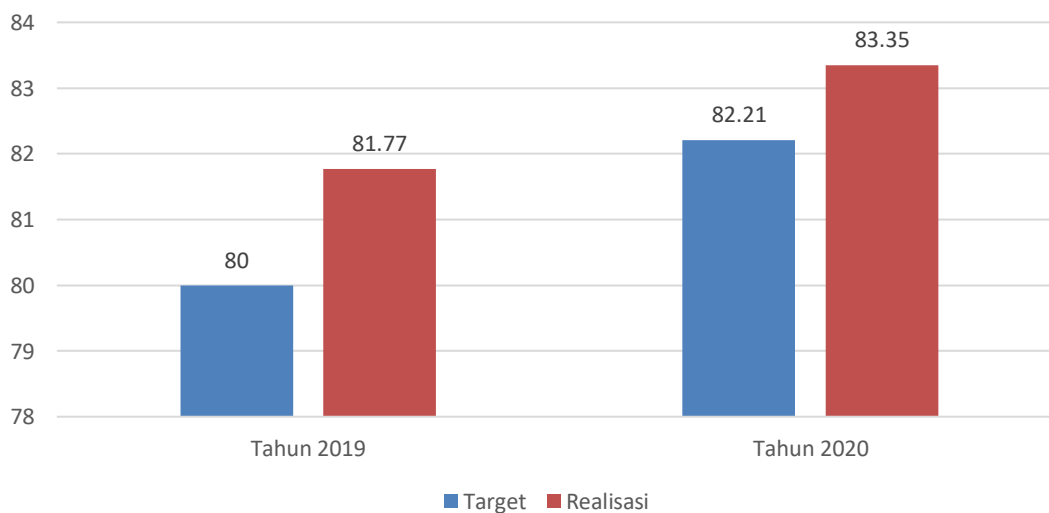
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
Kecamatan Cibiru

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	Nilai	80	81.77	102.21	82.21	83.35	101.39

Grafik 3.1 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru Tahun 2020





Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru" adalah sebesar 83.35 dari target sebesar 82.21 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.39 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

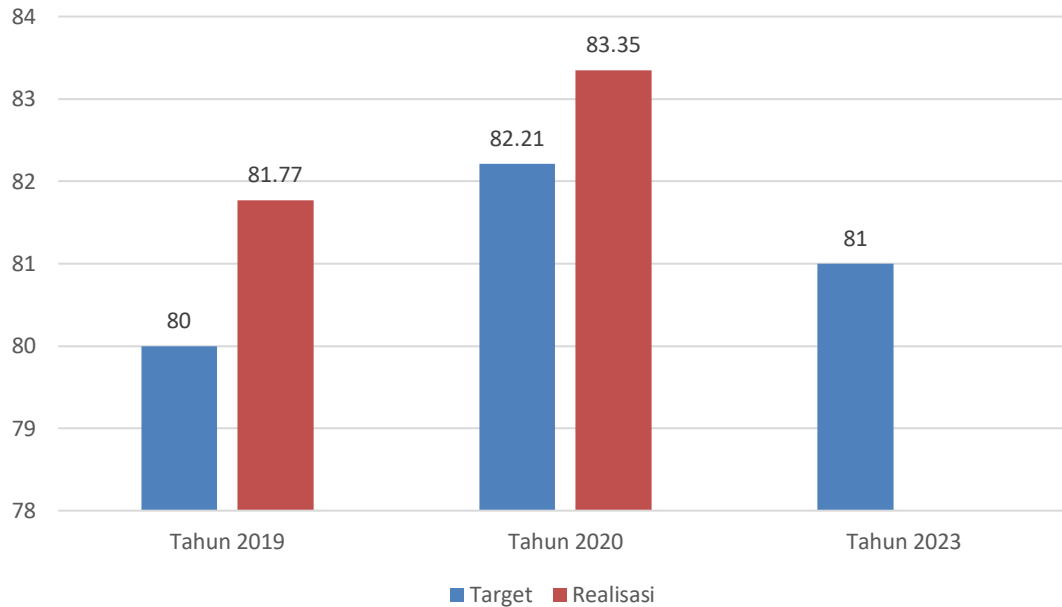
Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru" tahun ini menurun 0.82 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 102.21 %

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
Terhadap Target Akhir Renstra 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	Nilai	80	81.77	102.21	82.21	83.35	101.39	81



Grafik 3.2 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra 2023



Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru" tahun ini adalah sebesar 101.39 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Cibiru maka capaian kinerjanya mencapai 102.90 %.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cibiru :

▪ **Penjelasan umum dan sasaran indikator**

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sangat penting untuk diketahui seberapa besar kinerja aparat dalam melayani masyarakat di wilayah. Penggunaan media sangat penting dalam penyebaran informasi pelayanan publik agar informasi dapat sampai ke lapisan masyarakat bawah. Kepuasan Masyarakat perlu menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja dengan menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dengan meningkatkan kinerja diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi ke-2 Kota Bandung yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih” dengan sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cibiru dan indikator sasaran Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru.

▪ **Instrumen atau cara pengukuran**

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru adalah rata-rata IKM Kecamatan dan Kelurahan dengan 9 unsur penilaian survey kepuasan masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM).

▪ **Kinerja nyata dengan rencana**

Hasil kinerja nyata indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tahun 2020 adalah sebesar 83,35 dari target sebesar 82,21 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,39 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit



pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11, sebagai berikut:

Tabel 3.8 Hasil Nilai Unsur Pelayanan (NRR) Rata-rata Kecamatan Cibiru Tahun 2020

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR)
1	Persyaratan (U1)	3,2719
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (U2)	3,2414
3	Waktu Penyelesaian (U3)	3,1795
4	Biaya/Tarif (U4)	4
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)	3,2215
6	Kompetensi Pelaksana (U6)	3,2660
7	Perilaku Pelaksana (U7)	3,2883
8	Sarana dan Prasarana (U8)	3,2161
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)	3,3509
10	Nilai Unsur Tertinggi	4
11	Nilai Unsur Terendah	3,1795

Sumber : Kecamatan Cibiru jumlah Responden sebanyak : 196 orang

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$(NRR U1 \times 0,11) + (NRR U2 \times 0,11) + (NRR U3 \times 0,11) + (NRR U4 \times 0,11) + (NRR U5 \times 0,11) + (NRR U6 \times 0,11) + (NRR U7 \times 0,11) + (NRR U8 \times 0,11) + (NRR U9 \times 0,11) = 3.35$$



Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai IKM setelah dikonversi = **83.35**
- b. Mutu Pelayanan = **B**
- c. Kinerja unit pelayanan adalah = **Baik**

Dari data diatas hasil survei kepuasan masyarakat terhadap 9 Unsur Pelayanan dari 4 (empat) unit pelayanan Kelurahan dan Kecamatan Cibiru bahwa :

1. Unsur Biaya/Tarif (U4) merupakan unsur pelayanan yang harus dipertahankan dengan nilai unsur pelayanan rata-rata (NRR) tertinggi sebesar 4 dimana tarif atau biaya terhadap berbagai pelayanan masyarakat gratis (tidak dipungut biaya);
2. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9) memberikan kontribusi terbesar kedua dengan nilai 3.3509 dimana Kecamatan Cibiru cepat dalam merespon keluhan atau pengaduan dan saran-saran dari masyarakat pada aplikasi layanan pengaduan yang telah disediakan;
3. Kontribusi terbesar ketiga adalah unsur perilaku pelayanan (U7) sebesar 3.2883 dimana petugas pelayanan Kecamatan Cibiru melayani masyarakat dengan sopan dan ramah;
4. Unsur terendah pertama yang menjadi prioritas perbaikan adalah Kecepatan Pelayanan (U3) oleh petugas pelayanan yang harus ditingkatkan dengan memberikan pelatihan kapasitas petugas pelayanan dan memberikan batas waktu maksimal pelayanan untuk setiap satu orang warga yang membuat permohonan produk pelayanan;



5. Unsur terendah kedua yaitu sarana dan prasarana (U8) hal ini perlu menjadi perhatian dengan meningkatkan fasilitas pelayanan;
6. Unsur terendah ketiga adalah produk spesifikasi jenis pelayanan (U5) hal ini terjadi karena adanya tumpang tindih kewenangan yang berdampak pada perbedaan persyaratan dalam permohonan produk pelayanan.

Adapun yang mempengaruhi nilai tertinggi sebagai berikut :

1. Tidak adanya pungutan biaya (gratis) pengurusan dalam memperoleh pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dll sehingga masyarakat merasakan pelayanan yang prima dari segi biaya;
2. Telah tersedianya sarana dan prasarana pengaduan berupa Aplikasi Laporkan bagi masyarakat terhadap produk layanan masyarakat yang memudahkan masyarakat melakukan pengaduan atau memberi saran dan masukan kepada petugas pelayanan Kelurahan dan Kecamatan sehingga dapat direspon dan ditanggapi dengan cepat oleh petugas pelayanan Kelurahan dan Kecamatan.
3. Perilaku petugas pelayanan yang ramah dan sopan meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pengurusan permohonan produk pelayanan.

Adapun yang mempengaruhi nilai terendah sebagai berikut :

1. Batas waktu penyelesaian layanan produk belum diterapkan secara maksimal oleh unit kegiatan pelayanan di Kecamatan Cibiru;
2. Belum tersedianya kursi pelayanan khusus untuk ibu hamil/menyusui maupun anak-anak, disabilitas, ruangan pelayanan yang sempit, kurangnya sirkulasi udara, belum adanya



format produk pelayanan dalam huruf braile, belum adanya aplikasi antrian online untuk mempermudah masyarakat, sehingga hal-hal inilah yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dari segi unsur sarana dan prasarana;

3. Adanya tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan perbedaan persyaratan dalam permohonan produk pelayanan sehingga masyarakat merasa kurang puas dengan produk pelayanan yang diberikan.

Meskipun telah mencapai target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya meningkatkan waktu penyelesaian produk layanan yang diberikan kepada masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dan melakukan kordinasi dengan instansi terkait perihal informasi persyaratan produk-produk pelayanan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

▪ **Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya**

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun tahun 2020 adalah sebesar 83,35 bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2019 sebesar 81,77 maka mengalami peningkatan sebesar 1,58 point. Capaian kinerja nyata indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 dengan Tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Peningkatan pencapaian kinerja nyata indikator kinerja utama seiring dengan beberapa indikator unsur pelayanan Kecamatan dan



Kelurahan yang naik. Hal dapat dilihat dari beberapa unsur (NRR) yang mempengaruhi nilai tersebut antara lain :

- Unsur Biaya/Tarif meningkat 0,0437 point
- Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan menurun sebesar 0,1354 point
- Unsur Perilaku Pelaksana mengalami penurunan 0,198 point
- Unsur Kompetensi Pelaksana mengalami peningkatan sebesar 0.0624 point

Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa unsur pelayanan yang masih dilakukan perbaikan diantaranya menyediakan ruang pengelolaan penanganan pengaduan bagi masyarakat.

▪ **Kinerja nyata dengan target akhir Renstra**

Hasil capaian kinerja nyata indikator kinerja utama sasaran 1 Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru pada tahun 2020 adalah sebesar 83,35 bila dibandingkan dengan target capaian kinerja jangka menengah (akhir Renstra) tahun 2023 sebesar 81 baru mencapai 102,90 %. Untuk mencapai target kinerja tersebut maka perlu dilakukan perbaikan unsur layanan secara terus menerus dan konsisten terhadap pelayanan yang harus diberikan Kecamatan dan Kelurahan kepada masyarakat dan serta perlu ditingkatkan secara maksimal sehingga capaian kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang diperjanjikan.



- **Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya**

Tabel 3.9 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**Kecamatan Se-Kota Bandung Tahun 2020**

NO	KECAMATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	SUMUR BANDUNG	79	87,89	111,25
2	ANTAPANI	80	86,08	107,6
3	BANDUNG KIDUL	80,02	86	107,47
4	RANCASARI	81	85,74	105,85
5	CIDADAP	80,5	84,16	104,55
6	BUAH BATU	80	83,42	104,28
7	SUKASARI	80	83,42	104,28
8	CINAMBO	82,8	85,81	103,64
9	BOJONGLOA KIDUL	80,2	83,11	103,63
10	COBLONG	84,92	87,89	103,5
11	UJUNG BERUNG	83,2	85,68	102,98
12	ANDIR	81,6	83,84	102,75
13	BABAKAN CIPARAY	81	82,86	102,3
14	CIBIRU	82,21	83,9	102,06
15	PANYILEUKAN	83,4	84,88	101,77
16	CIBEUNYING KALER	86,3	87,67	101,59
17	BATUNUNGGAL	83	84,3	101,57
18	KIARACONDONG	82	83,23	101,5
19	LENGKONG	82	83,02	101,24
20	REGOL	83,5	84,51	101,21
21	MANDALA JATI	81	81,86	101,06
22	ASTANA ANYAR	82,25	82,91	100,8
23	CICENDO	85,84	86,27	100,5
24	SUKAJADI	83	83,25	100,3
25	ARCAMANIK	83,55	83,77	100,26
26	GEDEBAGE	83,55	83,77	100,26
27	BANDUNG WETAN	82,46	82,66	100,24
28	CIBEUNYING KIDUL	84,34	84,49	100,18
29	BOJONGLOA KALER	83,7	83,83	100,16
30	BANDUNG KULON	83,15	83,16	100,01
	RATA-RATA	82,32	84,45	102,59

Dari tabel perbandingan realisasi kinerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan se-Kota Bandung. Nilai realisasi IKM tertinggi jatuh pada Kecamatan Sumur Bandung dengan target sebesar 79 dan realisasi nilai IKM sebesar 87,89 atau capaiannya sebesar 111,25 %, angka peningkatan ini cukup besar jika dibandingkan dengan rata-rata peningkatan capaian IKM Kecamatan Se-Kota Bandung yaitu sebesar 102,59 %. Sedangkan realisasi IKM Kecamatan Cibiru sebesar 83,35 angka ini lebih besar dari target yaitu sebesar 82,21 atau capaiannya sebesar 101,39 % . Namun demikian peningkatan capaian tersebut masih berada dibawah rata-rata capaian



IKM kecamatan se-Kota Bandung. Jika disusun urutan realisasi dari nilai tertinggi hingga terendah maka Kecamatan Cibiru berada pada posisi ditengah- tengah atau pada urutan ke-15 dari 30 kecamatan. Dan jika disusun urutan capaiannya, dari nilai tertinggi hingga terendah maka capaian Kecamatan Cibiru berada pada urutan ke-14 dari jumlah 30 Kecamatan se-Kota Bandung.

▪ **Output program/kegiatan dan keuangan**

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 1 yaitu terdiri atas program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Pemerintahan sebesar 79,95 %, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 70,46 %, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 53,18 %, Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan sebesar 98,35 %, dan Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum sebesar 99,87 % dengan kata lain program dan kegiatan yang mendukung sasaran 1 yaitu Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru telah berhasil dan berjalan dengan baik.

Target yang ingin di capai (outputs) adalah 82,21. Realisasi (inputs) 83,35 dengan capaian kinerja = $\text{INPUTS}/\text{OUTPUTS} \times 100 \% = 83,35/82,00 \times 100 \% = 101,39 \%$. Hasil (outcomes) yang dicapai Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cibiru.

Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Cibiru ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan serta



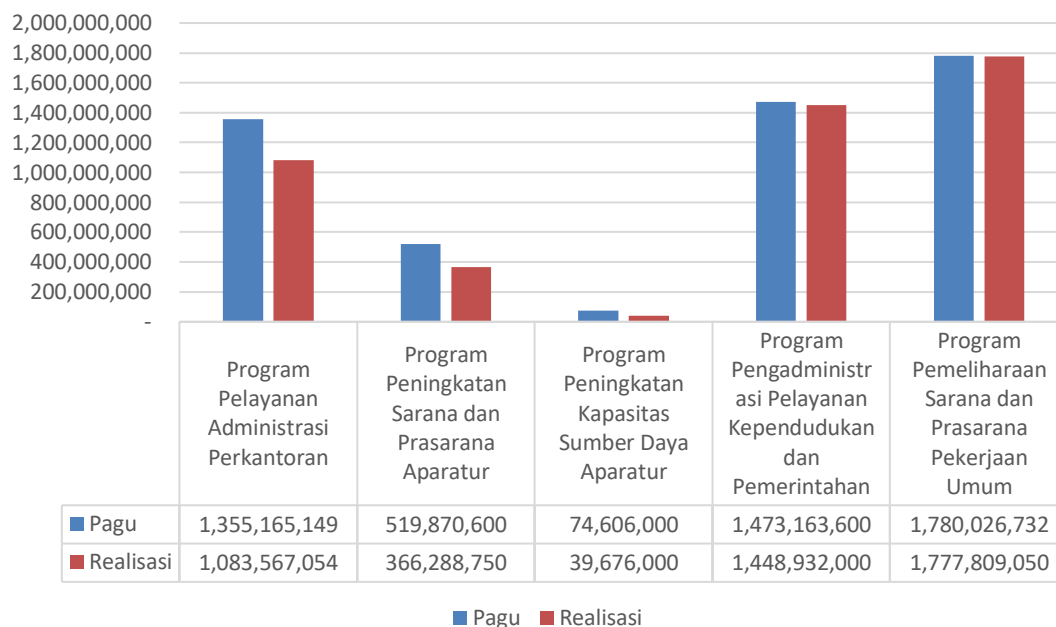
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum dalam RKPD Tahun 2020

sebagai berikut:

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan kependudukan kewilayahan	IKM layanan kependudukan	82,21	Hasil Survey kepuasan dilakukan terhadap 196 orang yang di survey secara acak dengan mutu pelayanan : A (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00 B (Baik) : 76,61 – 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99	$= \frac{\text{Hasil Survey}}{\text{Target IKM}} \times 100 \%$ $= \frac{83,35}{82,21} \times 100\%$ $= 101,39 \%$ <p>Hasil mutu pelayanan yang dicapai B (Baik)</p>
Kegiatan Pembinaan RT RW	Cakupan RT RW terbina	53 RW	53 RW	$= \frac{53 \text{ RW}}{53 \text{ RW}} = 100 \%$
Kegiatan Pemeliharaan drainase dan kebersihan lingkungan	- Panjang ruas jalan terpelihara	- 24.000 m	- 24.000 m	$= \frac{24.000 \text{ m}}{24.000 \text{ m}} = 100 \%$
	- Panjang drainase terpelihara	- 24.000 m	- 24.000 m	$= \frac{28.496 \text{ m}}{28.496 \text{ m}} = 100 \%$
Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan	Jumlah taman terpelihara	4 taman	4 taman	$= \frac{4 \text{ taman}}{4 \text{ taman}} = 100 \%$



**Grafik 3.3 Capaian Realisasi Anggaran Program Kecamatan Cibiru
Tahun 2020**



Dari grafik pencapaian realisasi anggaran Kecamatan Cibiru Tahun 2020 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum sebesar Rp. 1.777.809.050 persentase capaian sebesar 99.88 %, Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan sebesar Rp. 1.448.932.000,- persentase capaian sebesar 98.36 %, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 1.083.567.054,- persentase capaian sebesar 79.96 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 366.288.750,- persentase capaian sebesar 70.46 %, dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 39.676.000,- persentase capaian sebesar 53.18 %. Jika dikaitkan dengan indikator sasaran Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat berdasarkan 9 unsur pelayanan maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kesesuaian secara langsung antara



anggaran program dan kegiatan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator kinerja rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) bahwa hasil survei yang didapatkan dari masyarakat merupakan survei kepuasan terhadap pelayanan sedangkan program dan kegiatan yang terdapat di Kecamatan Cibiru tidak menunjang atau terkait dengan pelayanan langsung.

Dengan nilai sasaran target yang sudah kami tentukan ada beberapa kendala yang kami alami untuk mendapatkan nilai yang objektif di antaranya :

1. Tidak semua warga masyarakat penerima pelayanan, memahami pentingnya pelaksanaan IKM, sehingga tidak jarang masyarakat penerima pelayanan tidak bersedia untuk mengisi kuisioner yang kami berikan.
2. Masyarakat yang mengisi kuisioner yang kami berikan sering kali tidak mengisinya dengan objektif sesuai dengan apa yang dirasakan dari pelayanan yang diterima.
3. Menentukan responden yang dapat mengisi kuisioner secara obyektif, merupakan prioritas kami untuk mendapatkan nilai IKM yang obyektif.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas,



maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperhatikan nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan maka perlu menindak lanjuti dengan penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan rencana aksi serta anggaran untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan.
2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja yang dilakukan serta sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk pelayanan publik yang lebih prima.

**Sasaran 2**

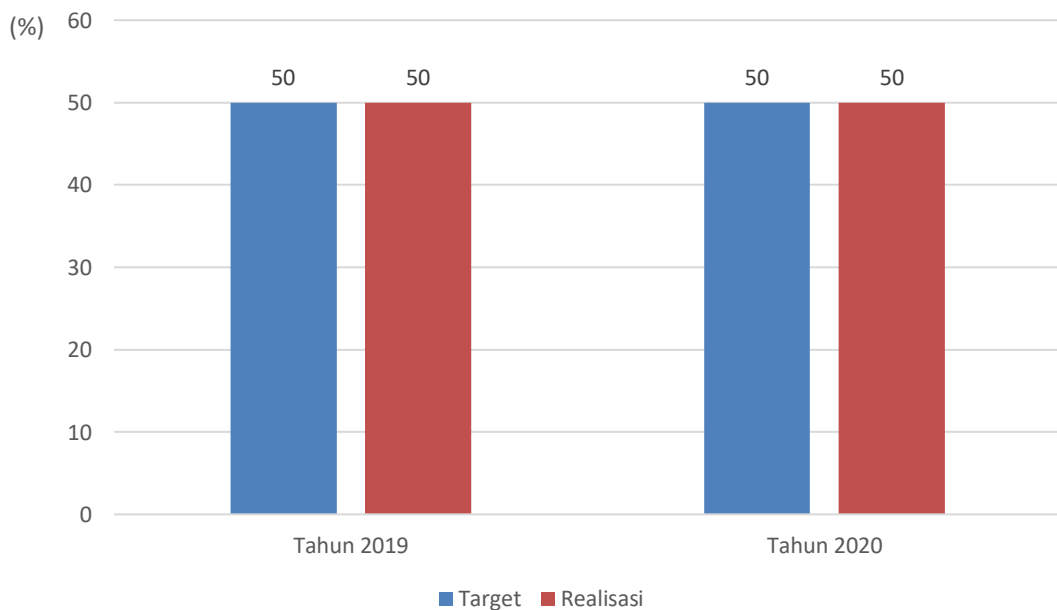
Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	100.00	50	50	100.00

Grafik 3.4 Capaian Persentase Kelurahan Unggul





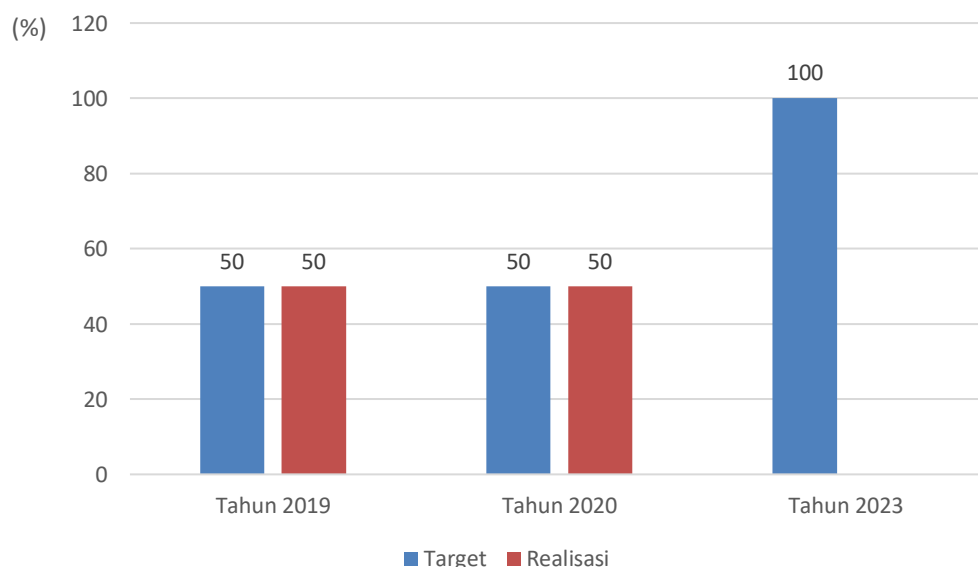
Sasaran Meningkatkan Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" adalah sebesar 50 dari target sebesar 50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam
keamanan dan kenyamanan lingkungan Terhadap
Target Akhir Renstra 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	100	50	50	100	100

Grafik 3.5 Capaian Persentase Kelurahan Unggul





Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Cibiru maka capaian kerjanya mencapai 50.00 %.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan :

▪ **Penjelasan umum dan sasaran indikator**

Isu keadilan dalam pembangunan kewilayahan, selalu menjadi perbincangan hangat, terutama terkait dengan masalah kesenjangan wilayah (regional imbalances). Untuk itu dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan kewilayahan maka perlu meningkatkan peran para pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Terdapat dua fokus dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan yaitu peningkatan peran kelembagaan dan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan profil kinerja aparatur pemerintah yang kuat dan memiliki mental melayani, untuk itu perlu membangun kekuatan aparatur yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan aspiratif terhadap segala kondisi yang muncul di tengah masyarakat kewilayahan. Penghayatan terhadap masing-masing peran dan tanggung jawab sebagai aparat negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak dibutuhkan. Kecamatan Cibiru dengan Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan diperlukan sebagai langkah membangun sebuah pemerintahan yang akuntabel untuk mewujudkan 1 (satu) misi ke-2 Kota Bandung yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih” adalah Meningkatkan Kepuasan Masyarakat. Sasaran Kecamatan Cibiru Kota Bandung adalah



Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.

▪ **Instrumen atau cara pengukuran**

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kewilayahan adalah adanya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam mewujudkan cita-cita pembangunan kepala daerah. Peran serta masyarakat dan kelembagaan yang ada di kewilayahan dalam pembangunan dapat mewujudkan kelurahan yang unggul.

Adapun maksud diwujudkannya kelurahan unggul adalah agar kelurahan tersebut mampu menghadapi tantangan pembangunan diantara kecepatan perubahan yang dapat merubah prilaku/cara pandang masyarakat tentang hidup bermasyarakat.

Instrumen/Cara Pengukuran Indikator Persentase Kelurahan Unggul adalah dengan terpenuhinya 5 dari 12 kriteriteria kelurahan unggul yaitu :

1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib),
2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana),
3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos),
4. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah,
5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM),
6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM),
7. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM),



8. Septic Tank Komunal (Ekbang),
9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang),
10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang),
11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang) dan;
12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)

▪ **Kinerja nyata dengan rencana**

Realisasi capaian indikator kinerja **Persentase Kelurahan Unggul** tahun 2020 sebesar 50,00 % dengan capaian kinerja nyata sebesar 100,00 % dari target 50,00 % yang diperjanjikan. Persentase Kelurahan Unggul Tahun 2020 sebesar 50,00 %, merupakan % Kelurahan yang memenuhi kriteria Kelurahan Unggul dibagi jumlah Kelurahan dengan rincian kriteria sebagai berikut : Kelurahan yang telah memenuhi kriteria Kelurahan Unggul sebanyak 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Cipadung dan Kelurahan Pasirbiru sementara 2 Kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Palasari dan Kelurahan Cisurupan belum memenuhi sebagai kriteria Kelurahan Unggul, sehingga pencapaian baru 50,00 %.

**Capaian Kriteria Kelurahan Unggul**

No	Kriteria Kelurahan Unggul	Kelurahan			
		Palasari	Cipadung	Pasirbiru	Cisurupan
1	Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib),				
2	Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana),		✓	✓	
3	Pojok Baca / Taman Baca (Kesos),		✓	✓	
4	Gerakan menyemarakkan tempat ibadah,		✓	✓	
5	Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM),			✓	
6	Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM),				
7	Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM),				
8	Septic Tank Komunal (Ekbang),		✓	✓	
9	Bank sampah per kelurahan (Ekbang),		✓	✓	
10	Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang),		✓	✓	
11	Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)		✓	✓	
12	Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)		✓	✓	
Jumlah					
Capaian Kinerja					

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai Kelurahan Unggul yaitu Kelurahan Cipadung dan Kelurahan Pasirbiru.



▪ **Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya**

Capaian realisasi kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan Unggul pada Tahun 2020 adalah sebesar 50,00 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2019 sebesar 50 % maka tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan kinerja sehingga capaian kinerja nyata tahun 2020 terhadap realisasi tahun 2019 sebesar 100,00 %. Meskipun sudah mencapai target, berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja diantaranya mempertahankan kondisi kegiatan yang menjadi parameter Kelurahan Unggul bagi Kelurahan yang telah mencapai kriteria Kelurahan Unggul, sedangkan bagi Kelurahan yang belum unggul akan ditingkatkan terus kondisi kegiatannya sehingga menjadi Kelurahan Unggul.

▪ **Kinerja nyata dengan target akhir Renstra**

Pencapaian hasil kinerja tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 50.00 %, dan bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Cibiru sebesar 100,00 % maka capaian kerjanya baru mencapai 50,00 %. Untuk mencapai target kinerja akhir Renstra maka perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan kondisi kegiatan yang menjadi kriteria atau parameter Kelurahan Unggul bagi Kelurahan yang belum unggul.

**▪ Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya**

NO	KECAMATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	SUKASARI	25	90,38	361,52
2	CIBEUNYING KALER	25	50	200
3	CICENDO	55,15	100	181,32
4	CINAMBO	55,15	100	181,32
5	ASTANAANYAR	50	83,33	166,66
6	LENGKONG	35	57,14	163,26
7	ANTAPANI	50	75	150
8	RANCASARI	75	100	133,33
9	BANDUNG KIDUL	50	51	102
10	ANDIR	38,46	38,46	100
11	ARCAMANIK	75	75	100
12	BABAKAN CIPARAY	50	50	100
13	BATUNUNGGAL	50	50	100
14	BANDUNG KULON	30	30	100
15	BANDUNG WETAN	75	75	100
16	BUAH BATU	50	50	100
17	BOJONGLOA KALER	100	100	100
18	BOJONGLOA KIDUL	66,66	66,66	100
19	CIBEUNYING KIDUL	33,33	33,33	100
20	CIBIRU	50	50	100
21	CIDADAP	66,66	66,66	100
22	COBLONG	66,67	66,67	100
23	GEDE BAGE	75	75	100
24	KIARACONDONG	50	50	100
25	REGOL	28,57	28,57	100
26	MANDALAJATI	75	75	100
27	SUKAJADI	40	40	100
28	SUMUR BANDUNG	66,67	66,67	100
29	UJUNG BERUNG	40	40	100
30	PANYILEUKAN	100	100	100
	RATA-RATA	54,91	64,46	117,39

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian kinerja Kelurahan Unggul tingkat kecamatan se-Kota Bandung Tahun 2020 Realisasi Kelurahan Unggul tertinggi jatuh pada Kecamatan Rancasari, Bojongloa Kaler dan Panyileukan. Target capaian kelurahan



unggul pada Kecamatan Rancasari sebesar 75 % dan realisasinya sebesar 100% artinya pada kecamatan tersebut kriteria kelurahan unggul telah terpenuhi semua. Demikian juga pada kecamatan Bojongloa Kaler dan Panyileukan pada Tahun 2020 semua kelurahan pada kecamatan tersebut telah memenuhi kriteria kelurahan unggul. Kecamatan Cibiru menargetkan capaian kelurahan unggul sebesar 50% atau sebanyak 2 (dua) Kelurahan yang telah memenuhi kriteria kelurahan unggul yaitu Kelurahan Pasirbiru dan Kelurahan Cipadung. Jika dibandingkan dengan Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Ujung Berung maka realisasi capaian kinerja Kelurahan Unggul Kecamatan Cibiru masih lebih baik.

▪ **Output program/kegiatan dan keuangan**

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 2 yaitu terdiri atas program peningkatan peran kelembagaan, masyarakat keamanan dan kenyamanan lingkungan untuk tahun 2020 mencapai 100,00 %.

Target yang ingin di capai (outputs) adalah 50,00. Realisasi (inputs) 50,00 dengan capaian kinerja = $\text{INPUTS}/\text{OUTPUTS} \times 100 \% = 50,00/50,00 \times 100 \% = 100,00 \%$. Hasil (outcomes) yang dicapai Meningkatkan Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam program Peningkatan peran kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam RKPD Tahun 2020 sebagai berikut:



NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Program Peningkatan peran kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase Kelurahan Unggul	4 Kelurahan	4 Kelurahan	$= \frac{\text{Memenuhi kriteria}}{\text{Target Kel Unggul}} \times 100 \%$ $= \frac{2 \text{ Kelurahan}}{4 \text{ Kelurahan}} \times 100\%$ $= 50,00 \%$
Kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	11 RW	11 RW	$= \frac{11 \text{ RW}}{11 \text{ RW}} = 100 \%$
Kegiatan Penguatan kelembagaan swadaya masyarakat kewilayahan	- Jumlah RW berdaya	- 4 RW	4 RW	$= \frac{4 \text{ RW}}{4 \text{ RW}} = 100 \%$
	- Jumlah Posyandu Purnama	- 4 posyandu	- 4 Posyandu	$= \frac{4 \text{ posyandu}}{4 \text{ posyandu}} = 100 \%$
Kegiatan Peningkatan SDM kader kesejahteraan sosial	- Jumlah RW siaga	4 RW	4 RW	$= \frac{4 \text{ RW}}{4 \text{ RW}} = 100 \%$
	- Jumlah kagana Kelurahan	4 Kelompok	4 Kelompok	$= \frac{2 \text{ Kelompok}}{2 \text{ Kelompok}} = 100 \%$
Kegiatan pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah koperasi di tempat ibadah	4 koperasi	4 koperasi	$= \frac{4 \text{ koperasi}}{4 \text{ koperasi}} = 100 \%$
	- Jumlah koperasi juara	4 koperasi juara	4 koperasi	$= \frac{2 \text{ koperasi}}{4 \text{ koperasi}} = 50 \%$

Pencapaian Realisasi Keuangan terhadap Rencana Anggaran pada Program Peningkatan peran kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan sebesar Rp 2.252.589.300,- atau 93,64 %.

Faktor pendukung :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.



3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Cibiru.
4. Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik.

Faktor Penghambat :

1. Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum maksimal, berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan.
2. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kelurahan belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
3. Pertanggungjawaban hasil kegiatan berupa SPJ terlambat diselesaikannya sehingga hasil pencapaian dari kegiatan tidak maksimal.
4. Wabah pandemi virus covid 19 yang berkepanjangan berdampak terhadap hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
5. Keterbatasan anggaran yang menunjang kegiatan untuk pencapaian kinerja sasaran, karena kinerja sasaran yang baru terbentuk dan tersusun.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi pejabat PPTK dengan para pelaksana kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga yang terkait untuk melaksanakan Instrumen atau cara pengukuran indikator



sasaran Persentase Kelurahan Unggul agar 14 jenis kondisi kegiatan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program, kegiatan, dan rencana aksi serta anggaran untuk mencapai sasaran RPJMD dan janji Kepala Daerah.

2. Meningkatkan sumber daya yang ada, untuk lebih terfokus kepada 14 jenis kondisi kegiatan yang menjadi Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap jenis kondisi kegiatan yang menjadi parameter indikator sasaran Persentase Kelurahan Unggul.



Sasaran 3

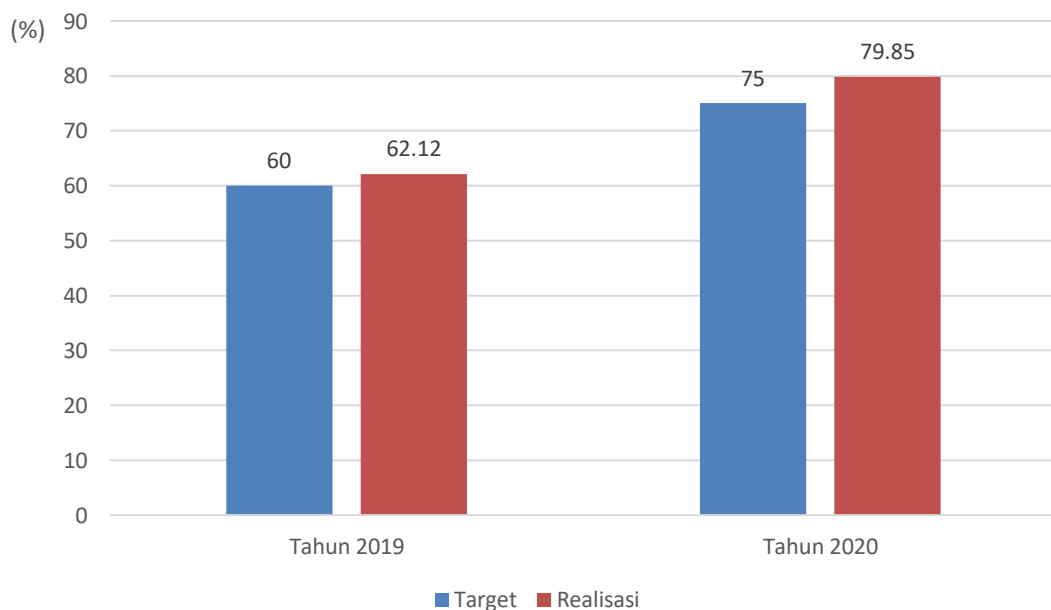
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	60	62.12	103.53	75	79.85	106.46

Grafk 3.6 Capaian Persentase Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan





Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" adalah sebesar 78.70 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 104.93 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

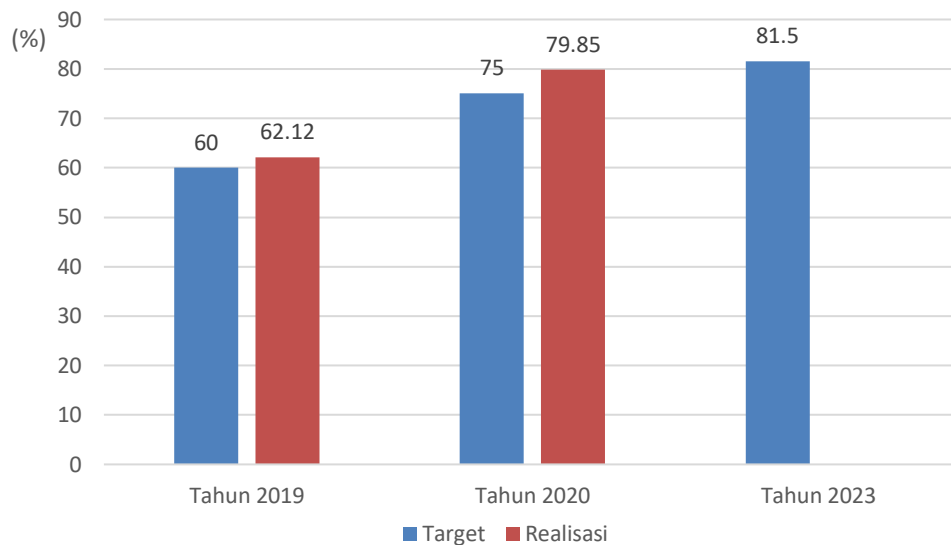
Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini meningkat 1.40 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 103.53

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Target Akhir
Renstra 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2023
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	60	62.12	103.53	75	79.85	106.47	81.50



**Grafk 3.7 Capaian Persentase Tingkat Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan**



Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini adalah sebesar 104.93 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Cibiru maka capaian kinerjanya mencapai 96.56 %. Hal yang dapat dilakukan untuk mencapai kinerja diantaranya kegiatan anggaran pemberdayaan mendukung tercapainya program kerja Wali Kota dan RPJMD lebih ditingkatkan kembali sehingga realisasi dapat melebihi target yang telah ditentukan.

Analisis pencapaian sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat :

▪ **Penjelasan umum dan sasaran indikator**

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan PIPPK adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di kewilayahan berorientasi pada pembangunan masyarakat setempat, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat kelurahan dengan didukung pendampingan teknis, pengawasan dan menyiapkan teknis pengadaan sarana dan



prasarana yang efektif, efisien dan transparan melalui pendekatan inovasi, desentralisasi dan kolaborasi.

Tujuan pelaksanaan kegiatan PIPPK antara lain adalah:

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam memetakan isu-isu sentral pembangunan berskala kecil yang memperhatikan kebutuhan dan kebermanfaatan di setiap kelurahan;
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di setiap kelurahan secara mandiri;
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang pembangunan ekonomi masyarakat khususnya pengembangan kewirausahaan sehingga terbuka peluang untuk menciptakan wirausaha baru dan lapangan kerja baru;
4. Memantapkan proses pembelajaran pengelolaan pembangunan di setiap kelurahan; dan
5. Meningkatkan kemampuan dan peranan masyarakat dalam penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di setiap kelurahan.

▪ **Instrumen atau cara pengukuran**

Instrumen atau cara pengukuran indikator sasaran Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul adalah Persentase RW Unggul + Persentase PKK Unggul + Persentase Karang Taruna Unggul + Persentase LPM Unggul.

1. Persentase RW Unggul memenuhi atau melaksanakan minimal salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan



50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung.

2. Persentase PKK Unggul memenuhi atau melaksanakan minimal kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung.
3. Persentase Karang Taruna Unggul memenuhi atau melaksanakan minimal kriteria Karang Taruna Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan Karang Taruna untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung.
4. Persentase LPM Unggul memenuhi atau melaksanakan minimal kriteria LPM Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan LPM untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung.

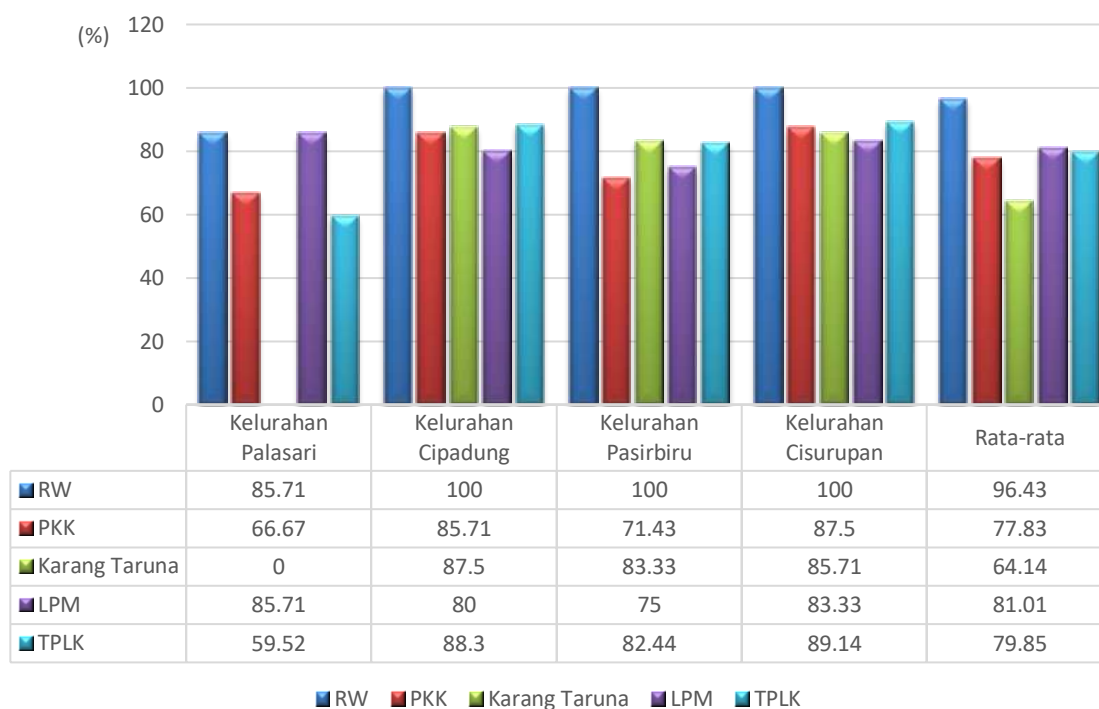
▪ **Kinerja nyata dengan rencana**

Berdasarkan hasil rekapitulasi pencapaian Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul, pada masing-masing Kelurahan di Kecamatan Cibiru diperoleh data sebagai berikut :

Wilayah	Kriteria				%
	% Kelembagaan Unggul				
	RW	PKK	Karang Taruna	LPM	TPLK
Kelurahan Palasari	85,71	66,67	0	85,71	59,52
Kelurahan Cipadung	100	85,71	87,50	80	88,3
Kelurahan Pasirbiru	100	71,43	83,33	75,00	82,44
Kelurahan Cisarupan	100	87,50	85,71	83,33	89,14
Rata-rata	96,43	77,83	64,14	81,01	79,85



Grafik 3.7 Capaian Persentase Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2020



Realisasi capaian indikator kinerja Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul tahun 2020 sebesar 79,85 % atau 106,46 % dari target 75 % yang diperjanjikan. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul sebesar 79,85 % , merupakan jumlah rata2 % RW Unggul + % LKK Unggul dengan rincian kriteria sebagai berikut :

- RW Unggul = 96,43 % sub kegiatan lingkup RW
- LKK Unggul = 79,85 % sub kegiatan lingkup LKK, yang terdiri atas ;
 - PKK Unggul = 77,83 % sub kegiatan lingkup PKK
 - Karang Taruna Unggul = 64,14 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna
 - LPM unggul = 81,01 % sub kegiatan lingkup LPM



Analisis Pencapaian Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul pada data diatas dapat kita lihat bahwa kriteria yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk perbaikan adalah pada Karang Taruna Unggul karena mempunyai posisi terendah pada penyerapan anggaran Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul, sedangkan posisi nilai tertinggi adalah pada RW Unggul, untuk lebih jelas kriteria tertinggi dan terendah hasil Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Tahun 2020 di Kecamatan Cibiru yaitu :

Kriteria paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu RW Unggul. Kriteria paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada Karang Taruna Unggul.

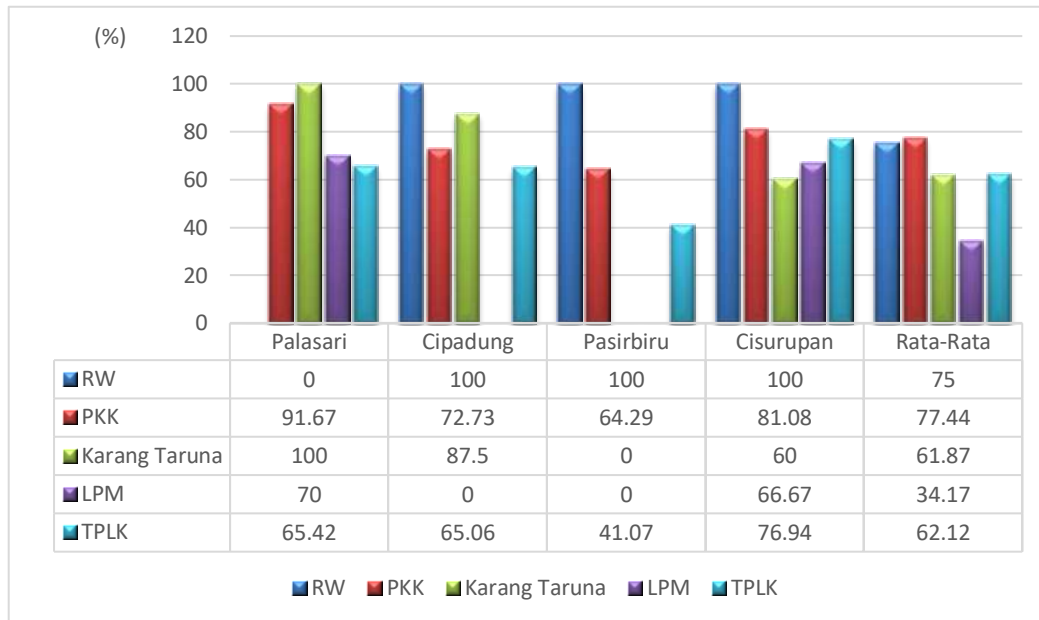
Yang mempengaruhi nilai terendah adalah sebagai berikut :

- Masih banyaknya kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk meraih predikat Karang Taruna Unggul dan LKK Unggul belum dilaksanakan di masing-masing tingkat RW.
- Masih banyak pengurus Karang Taruna yang belum mengetahui dan memahami kriteria Karang Taruna Unggul dan LKK Unggul.
- Belum Banyak kegiatan yang mendukung program kerja Walikota dan RJPMD Kota Bandung, hal ini dikarenakan anggaran yang disusun belum terfokus pada program kerja Wali Kota dan RPJMD.



- **Kinerja nyata dengan tahun sebelumnya**

**Grafk 3.8 Capaian Persentase Tingkat Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Tahun 2019**



Capaian realisasi kinerja nyata Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 17,73 % bila dibandingkan dengan tahun 2019 dengan capaian kinerjanya sebesar 2,94 % dengan hampir semua Lembaga Kemasyarakatan mengalami peningkatan pada tahun 2020. Hal-hal yang mempengaruhi peningkatan capaian kinerja adalah anggaran kegiatan pemberdayaan telah mendukung program kerja Wali Kota dan RPJMD.

- **Kinerja nyata dengan target akhir Renstra**

Hasil capaian realisasi kinerja nyata indikator kinerja utama Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul pada tahun 2020 adalah sebesar 79,85 % bila dibandingkan dengan target capaian kinerja akhir Renstra tahun 2023 sebesar 81,50 % maka capaian kinerjanya baru mencapai 97,97 %. Untuk mencapai kinerja tersebut



Kecamatan Cibiru

agar ditingkatkan kembali kegiatan pemberdayaan yang mendukung program kerja Wali Kota dan RPJMD sebagai parameter dan indikator kinerja serta fokus kepada kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul dan indikator kinerja utama Perangkat Daerah.

▪ Perbandingan kinerja dengan kinerja instansi lainnya

Berikut ini disampaikan capaian kinerja Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (TPLK) Se-Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 berikut dibawah ini :

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI		
		TPLK		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	ANDIR	56,36	57,93	102,79
2	ANTAPANI	50,00	75,24	150,48
3	ARCAMANIK	63,68	63,68	100,00
4	ASTANAANYAR	59,00	61,33	103,95
5	BABAKAN CIPARAY	79,00	80,50	101,90
6	BATUNUNGGAL	70,00	68,69	98,13
7	BANDUNG KIDUL	60,00	69,28	115,47
8	BANDUNG KULON	83,50	83,50	100,00
9	BANDUNG WETAN	57,22	57,22	100,00
10	BUAH BATU	61,85	61,85	100,00
11	BOJONGLOA KALER	50,00	70,41	140,82
12	BOJONGLOA KIDUL	50,00	60,10	120,20
13	CIBEUNYING KALER	50,00	60,10	120,20
14	CIBEUNYING KIDUL	44,86	46,55	103,77
15	CIBIRU	75,00	79,85	106,46
16	CICENDO	82,50	84,22	102,08
17	CIDADAP	65,87	68,48	103,96
18	CINAMBO	82,50	84,22	102,08
19	COBLONG	92,04	92,58	100,59
20	GEDE BAGE	63,68	63,68	100,00
21	CIBIRU	79,85	79,85	100,00
22	LENGKONG	50,00	59,13	118,26
23	RANCASARI	76,00	76,00	100,00
24	REGOL	36,17	36,17	100,00
25	MANDALAJATI	77,00	70,98	92,18
26	SUKASARI	75,00	97,25	129,67
27	SUKAJADI	78,14	78,33	100,24
28	SUMUR BANDUNG	92,04	92,58	100,59
29	UJUNG BERUNG	60,61	61,16	100,91
30	PANYILEUKAN	35,31	35,31	100,00

Capaian kinerja nyata indikator sasaran 3 Kecamatan Cibiru yaitu Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul pada tahun



2020 sebesar 79,85 % dari target 75 % dengan capaian kinerja sebesar 106,46 % tidak menduduki peringkat pertama dari seluruh Kecamatan se Kota Bandung, namun bila dibandingkan dengan realisasi wilayah Kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Panyileukan sebesar 35,31 % dari target 35,31 % dengan capaian kinerjanya sebesar 100,00 %, maka Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Cibiru lebih baik.

▪ **Output program/kegiatan dan keuangan**

Pencapaian output program/kegiatan atas kinerja sasaran 3 yaitu terdiri atas program pemberdayaan kewilayahan untuk tahun 2020 mencapai 100,00 %. Target yang ingin di capai (outputs) adalah 75 Realisasi (inputs) 79,85 dengan capaian kinerja = $\text{INPUTS}/\text{OUTPUTS} \times 100 \% = 75/79,85 \times 100 \% = 106,46 \%$. Hasil (outcomes) yang dicapai Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam program Pemberdayaan Kewilayahan dalam RKPD Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pemberdayaan lingkup RW

Target yang ingin di capai (outputs) adalah 96,43 % sub kegiatan lingkup RW. Realisasi (inputs) 96,43 % sub kegiatan lingkup RW dengan capaian kinerja = $\text{INPUTS}/\text{OUTPUTS} \times 100 \% = 96,43/96,43 \times 100 \% = 100,00 \%$. Hasil (outcomes) yang dicapai tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan unggul lingkup RW di Kecamatan Cibiru Tahun Anggaran 2020.



Kecamatan Cibiru

NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Pemberdayaan lingkup RW	% Sub kegiatan lingkup RW	Kelurahan Palasari = 65,48 % sub kegiatan lingkup RW	Kelurahan Palasari = 65,48 % sub kegiatan lingkup RW	$= \frac{65,48 \% \text{ sub keg}}{65,48 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Cipadung = 73,24 % sub kegiatan lingkup RW	Kelurahan Cipadung = 73,24 % sub kegiatan lingkup RW	$= \frac{73,24 \% \text{ sub keg}}{73,24 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Pasirbiru = 87,10 % sub kegiatan lingkup RW	Kelurahan Pasirbiru = 87,10 % sub kegiatan lingkup RW	$= \frac{87,10 \% \text{ sub keg}}{87,10 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Cisarupan = 83,61 % sub kegiatan lingkup RW	Kelurahan Cisarupan = 83,61 % sub kegiatan lingkup RW	$= \frac{83,61 \% \text{ sub keg}}{83,61 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$

2. Pemberdayaan lingkup PKK

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 77,83 % sub kegiatan lingkup PKK. Realisasi (*inputs*) 77,83 % sub kegiatan lingkup PKK dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{77,83}{77,83} \times 100 \% = 100,00\%$.

Hasil (*outcomes*) yang dicapai tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan unggul lingkup PKK di Kecamatan Cibiru Tahun Anggaran 2020.



Kecamatan Cibiru

NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Pemberdayaan lingkup PKK	% Sub kegiatan lingkup PKK	Kelurahan Palasari = 66,67 % sub kegiatan lingkup PKK	Kelurahan Palasari = 66,67 % sub kegiatan lingkup PKK	$= \frac{66,67 \% \text{ sub keg}}{66,67 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Cipadung = 85,71 % sub kegiatan lingkup PKK	Kelurahan Cipadung = 85,71 % sub kegiatan lingkup PKK	$= \frac{85,71 \% \text{ sub keg}}{85,71 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Pasirbiru = 71,43 % sub kegiatan lingkup PKK	Kelurahan Pasirbiru = 71,43 % sub kegiatan lingkup PKK	$= \frac{71,43 \% \text{ sub keg}}{71,43 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Cisarupan = 87,50 % sub kegiatan lingkup PKK	Kelurahan Cisarupan = 87,50 % sub kegiatan lingkup PKK	$= \frac{87,50 \% \text{ sub keg}}{87,50 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$

3. Pemberdayaan lingkup Karang Taruna

Target yang ingin di capai (outputs) adalah 64,14 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna. Realisasi (inputs) 64,14 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna dengan capaian kinerja = $\text{INPUTS}/\text{OUTPUTS} \times 100 \% = 64,14/64,14 \times 100 \% = 100,00\%$. Hasil (outcomes) yang dicapai tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan unggul lingkup Karang Taruna di Kecamatan Cibiru Tahun Anggaran 2020.



Kecamatan Cibiru

NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Pemberdayaan lingkup Karang Taruna	% Sub kegiatan lingkup Karang Taruna	Kelurahan Palasari = 0 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	Kelurahan Palasari = 0 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	$= \frac{0 \% \text{ sub keg}}{0 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Cipadung = 87,50 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	Kelurahan Cipadung = 87,50 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	$= \frac{87,50 \% \text{ sub keg}}{87,50 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Pasiribiru = 83,33 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	Kelurahan Pasiribiru = 83,33 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	$= \frac{83,33 \% \text{ sub keg}}{83,33 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Cisarupan = 85,71 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	Kelurahan Cisarupan = 85,71 % sub kegiatan lingkup Karang Taruna	$= \frac{85,71 \% \text{ sub keg}}{85,71 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$

4. Pemberdayaan lingkup LPM

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 81,01 % sub kegiatan lingkup RW. Realisasi (*inputs*) 81,01 % sub kegiatan lingkup LPM dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100 \% = \frac{81,01}{81,01} \times 100 \% = 100,00\%$.

Hasil (*outcomes*) yang dicapai tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan unggul lingkup LPM di Kecamatan Cibiru Tahun Anggaran 2020.



Kecamatan Cibiru

NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	OUTPUTS	INPUTS	CAPAIAN (%)
Pemberdayaan lingkup LPM	% Sub kegiatan lingkup LPM	Kelurahan Palasari = 85,71 % sub kegiatan lingkup LPM	Kelurahan Palasari = 85,71 % sub kegiatan lingkup LPM	$= \frac{85,71 \% \text{ sub keg}}{85,71 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Cipadung = 80 % sub kegiatan lingkup LPM	Kelurahan Cipadung = 80 % sub kegiatan lingkup LPM	$= \frac{80 \% \text{ sub keg}}{80 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Pasirbiru = 75 % sub kegiatan lingkup LPM	Kelurahan Pasirbiru = 75 % sub kegiatan lingkup LPM	$= \frac{75 \% \text{ sub keg}}{75 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$
		Kelurahan Cisurupan = 83,33 % sub kegiatan lingkup LPM	Kelurahan Cisurupan = 83,33 % sub kegiatan lingkup LPM	$= \frac{83,33 \% \text{ sub keg}}{83,33 \% \text{ sub keg}} = 100 \%$

Faktor pendukung :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA.
2. Adanya bimbingan teknis dan asistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kota Bandung.
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Cibiru.
4. Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan/Kelurahan ditanggapi dengan cukup baik.

Faktor Penghambat :

1. Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum maksimal, berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan.



2. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Kelurahan belum sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kelurahan sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
3. Pertanggungjawaban hasil kegiatan berupa SPJ terlambat diselesaikannya sehingga hasil pencapaian dari kegiatan tidak maksimal.
4. Wabah pandemi virus covid 19 yang berkepanjangan berdampak terhadap hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
5. Keterbatasan anggaran yang menunjang kegiatan untuk pencapaian kinerja sasaran, karena kinerja sasaran yang baru terbentuk dan tersusun.

Program/Kegiatan Fungsi Penunjang Lainnya

Untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cibiru dengan jumlah indikator 1 (satu) target indikator kinerja tahun 2020, hal ini ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan fungsi penunjang lainnya yaitu dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur serta Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam RKPD Tahun 2020

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 100 %. Realisasi (*inputs*) 82,21

% dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{82,21}{100} \times 100\% = 82,21\%$.

Hasil (*outcomes*) yang dicapai cakupan layanan administrasi perkantoran cukup memadai dan berhasil dalam mendukung program dan kegiatan untuk mencapai sasaran indikator kinerja tahun 2020.



Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 100 %. Realisasi (*inputs*) 100,00 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100,00\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik sangat memadai dan berhasil dalam mendukung program dan kegiatan untuk mencapai sasaran indikator kinerja tahun 2020.

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 100 %. Realisasi (*inputs*) 100,00 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100,00\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai sangat memadai dan berhasil dalam mendukung program dan kegiatan untuk mencapai sasaran indikator kinerja tahun 2020.

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Target yang ingin di capai (*outputs*) adalah 100 %. Realisasi (*inputs*) 100 % dengan capaian kinerja = $\frac{INPUTS}{OUTPUTS} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$. Hasil (*outcomes*) yang dicapai Presentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya sangat memadai dan berhasil dalam mendukung program dan kegiatan untuk mencapai sasaran indikator kinerja tahun 2020.

D. Realisasi Keuangan

1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun anggaran 2020, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang mempunyai personil sebanyak 53 orang Aparatur Sipil Negara berhasil menyelenggarakan



seluruh program dan kegiatan sampai dengan akhir Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar 94,15 % dan realisasi fisik 98,40 %.

Capaian Kinerja pada Kecamatan Cibiru berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerjanya ditunjang dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2020. Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada tahun anggaran 2020 menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dengan perincian sebagai berikut :

Dana APBD : Rp **22.342.582.007,-**

Alokasi anggaran Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada tahun 2020 sebesar Rp. **22.342.582.007,-**, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 10.414.641.671,- dan Belanja Langsung (BL) Rp. 11.927.940.336,-

Realisasi anggaran yang sudah terlaksanakan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung adalah sebesar **Rp. 20.516.169.175,-** Yang terdiri atas:

Belanja Tidak Langsung : Rp 9.233.635.331,-

Belanja Langsung : Rp 11.282.533.844,-

Jumlah : Rp 20.516.169.175,-



Tabel 3.12

Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Cibiru Tahun 2020

Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1.473.163.600	1.448.932.000	98,36
	1. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan kependudukan kewilayahan	71.433.600	55.522.000	77,73
	2. Kegiatan Pembinaan RT RW	1.401.730.000	1.393.410.000	99,41
II	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1.780.026.732	1.777.809.050	99,88
	1. Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan lingkungan	1.608.649.782	1.606.886.050	99,89
	2. Pemeliharaan RTH Kecamatan	142.545.400	142.532.000	99,99
	3. Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan (Kecamatan Cibiru)	28.831.550	28.391.000	98,47
III	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2.252.589.300	2.109.319.800	93,64
	1. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	1.510.019.550	1.483.102.800	98,22
	2. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	575.178.000	514.098.750	89,38



Kecamatan Cibiru

	3. Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial	66.849.000	53.172.500	79,54
	4. Kegiatan Pemberdayaan KUMKM Kewilayahan	70.556.000	28.959.000	41,04
	5. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kewilayahan	29.986.750	29.986.750	100,00
IV	Program Perlindungan Sosial Bencana	1.999.360	1.999.360	100,00
	1. Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	1.999.360	1.999.360	100,00
V	Program Pemberdayaan Kewilayahan	2.731.894.890	2.648.636.370	96,95
	1. Pemberdayaan Lingkup RW	2.130.448.690	2.078.943.355	97,58
	2. Pemberdayaan Lingkup PKK	200.529.800	188.178.400	93,84
	3. Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	200.806.400	194.401.275	96,81
	4. Pemberdayaan Lingkup LPM	200.110.000	187.113.340	93,51
VI	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.779.479.149	1.505.505.054	84,60
	1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	170.750.125	117.891.924	69,04
	2. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional	21.324.900	5.659.500	26,54
	3. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	421.200.000	421.200.000	100,00
	4. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	43.950.000	41.003.000	93,29



Kecamatan Cibiru

	5. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	124.091.200	117.573.500	94,75
	6. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	106.311.099	94.400.600	88,80
	7. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	24.390.550	24.097.200	98,80
	8. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	156.625.610	38.332.730	24,47
	9. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	66.421.665	65.302.600	98,32
	10. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.368.000	10.264.000	82,99
	11. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	163.446.000	131.708.000	80,58
	12. Kegiatan rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah	40.000.000	11.872.000	29,68
	13. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran	428.600.000	426.200.000	99,44
VII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	519.870.600	366.288.750	70,46
	1. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	6.258.600	6.050.550	96,68
	2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (Kecamatan Cibiru)	513.612.000	360.238.200	70,14
VIII	Program peningkatan disiplin aparatur	0	0	0
	1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	0
IX	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	74.606.000	39.676.000	53,18
	1. Kegiatan Pembinaan kinerja aparatur	74.606.000	39.676.000	53,18



Tabel 3.13
**Pagu dan Realisasi Anggaran Per Sasaran
Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2020**

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cibiru	5.280.952.081	4.894.415.524	92.68
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2.252.589.300	2.109.319.800	93.64
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	2.930.398.954	2.848.572.370	97.21
	Jumlah	10.463.940.335	9.852.307.694	94.15

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Cibiru Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.14

**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi
Kecamatan Cibiru Kota Bandung
Tahun 2020**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Sasaran 1				
1	Melebihi/Melampaui Target	1	101,39	4.894.415.524	92.68
2	Sesuai Target	-			
3	Tidak Mencapai Target	-			
B.	Sasaran 2				
1	Melebihi/Melampaui Target	-	100,00	2.109.319.800	93.64
2	Sesuai Target	1			
3	Tidak Mencapai Target	-			
C.	Sasaran 3				
1	Melebihi/Melampaui Target	1	106,46	2.848.572.370	97.21
2	Sesuai Target	-			
3	Tidak Mencapai Target	-			

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Cibiru Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

E. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cibiru Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Cibiru Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut,



sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Internasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun

2. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun

3. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun

4. Prestasi lainnya

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Kecamatan Cibiru Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101.39 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 106.46 %



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 10.457.681.735 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.848.757.144, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Kecamatan Cibiru Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silva Rp. 608.924.591

Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2020, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101.39 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 106.46 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp 9.848.757.144,- (sembilan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah



Kecamatan Cibiru

digunakan oleh Kecamatan Cibiru Kota Bandung adalah 94.15 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Cibiru Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cibiru Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Kota Bandung, 06 Januari 2021

CAMAT CIBIRU,


Drs. DIDIN DIKAYUANA, M.Kesos

Pembina/IV.a

19661027 199301 1 002



Kecamatan Cibiru

LAMPIRAN



LAPORAN KINERJA NYATA KECAMATAN CIBIRU
REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2020

NO.	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	KETERANGAN
1	<i>Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru</i>	82,21	nilai	83,35	TW-1 = 82,31 TW-2 = 83,54 TW-3 = 83,65 TW-4 = 83,90 Rata² nilai IKM TW-4 = 83,35
2	<i>Persentase Kelurahan Unggul</i>	50	Persentase	50	Kelurahan Pasirbiru dan Cipadung Kriteria : 1. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah; 2. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) 3. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana) 4. Bank sampah per kelurahan (Ekbang) 5. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang) 6. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) 7. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan.
3	<i>Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	75	Persentase	79,85	Kelurahan Cipadung = 88,30 Kelurahan Palasari = 59,52 Kelurahan Pasirbiru = 82,44 Kelurahan Cisarupan = 89,14 Rata² % Tingkat Pemberdayaan = 79,85
	<i>% RW Unggul</i>				<i>Persentase RW Unggul</i> Kelurahan Cipadung = 100,00 Kelurahan Palasari = 85,71 Kelurahan Pasirbiru = 100,00 Kelurahan Cisarupan = 100,00 Rata² % RW Unggul = 96,43



Kecamatan Cibiru

NO.	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	KETERANGAN
	% LKK Unggul				<i>Persentase PKK Unggul</i> Kelurahan Cipadung = 85,71 Kelurahan Palasari = 66,67 Kelurahan Pasirbiru = 71,43 Kelurahan Cisarupan = 87,50 Rata² % PKK Unggul 77,83 <i>Persentase LPM Unggul</i> Kelurahan Cipadung = 80,00 Kelurahan Palasari = 85,71 Kelurahan Pasirbiru = 75,00 Kelurahan Cisarupan = 83,33 Rata² % LPM Unggul 81,01 <i>Persentase Karta Unggul</i> Kelurahan Cipadung = 87,71 Kelurahan Palasari = 0 Kelurahan Pasirbiru = 83,33 Kelurahan Cisarupan = 85,71 Rata² % Karta Unggul 64,19

Cipadung, 04 Januari 2021
Kecamatan Cibiru,

Drs. DIDIN DIKAYUANA, M.Ke sos.
NIP. 196610271993011002



Kecamatan Cibiru

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 Kecamatan Cibiru

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2020	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran 1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kecamatan Cibiru)	72.838.400.00	8.352.879.00	11.47	22.283.556.00	30.59	38.413.729.00	52.74	54.352.790.00	74.62
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kelurahan Palasari)	20.490.525.00	3.316.284.00	16.18	6.629.505.00	32.35	9.297.389.00	45.37	13.373.141.00	65.26
1.3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kelurahan Cipadung)	29.760.000.00	3.997.284.00	13.43	7.910.648.00	26.58	11.960.382.00	40.19	15.906.265.00	53.45
1.4	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kelurahan Pasirbiru)	27.319.600.00	3.626.060.00	13.27	6.504.016.00	23.81	9.978.214.00	36.52	18.810.023.00	68.85
1.5	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kelurahan Cisarupan)	20.341.600.00	1.532.270.00	7.53	3.600.840.00	17.7	8.201.312.00	40.32	15.449.705.00	75.95
1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (Kecamatan Cibiru)	21.324.900.00	595.600.00	2.79	1.467.600.00	6.88	2.296.600.00	10.77	5.659.500.00	26.54
1.7	Penyediaan jasa kebersihan kantor (Kecamatan Cibiru)	37.200.000.00	6.200.000.00	16.67	15.500.000.00	41.67	24.800.000.00	66.67	37.200.000.00	100
1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor (Kelurahan Palasari)	9.600.000.00	1.650.000.00	17.19	4.050.000.00	42.19	6.450.000.00	67.19	9.600.000.00	100
1.9	Penyediaan jasa kebersihan kantor (Kelurahan Cipadung)	9.600.000.00	1.500.000.00	15.63	4.000.000.00	41.67	6.400.000.00	66.67	9.600.000.00	100
1.10	Penyediaan jasa kebersihan kantor (Kelurahan Pasirbiru)	9.600.000.00	1.650.000.00	17.19	3.950.000.00	41.15	6.200.000.00	64.58	9.600.000.00	100
1.11	Penyediaan jasa kebersihan kantor (Kelurahan Cisarupan)	9.600.000.00	1.650.000.00	17.19	3.950.000.00	41.15	6.350.000.00	66.15	9.600.000.00	100
1.12	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Kecamatan Cibiru)	23.800.000.00	0.00	0	1.950.000.00	8.19	6.100.000.00	25.63	21.553.000.00	90.56



Kecamatan Cibiru

1.13	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Kelurahan Palasari)	4.000.000.00	1.500.000.00	37.5	2.350.000.00	58.75	3.150.000.00	78.75	4.000.000.00	100
1.14	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Kelurahan Cipadung)	6.050.000.00	1.200.000.00	19.83	2.000.000.00	33.06	2.000.000.00	33.06	6.050.000.00	100
1.15	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Kelurahan Pasirbiru)	4.100.000.00	500.000.00	12.2	500.000.00	12.2	500.000.00	12.2	3.400.000.00	82.93
1.16	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Kelurahan Cisirupan)	6.000.000.00	1.000.000.00	16.67	1.000.000.00	16.67	2.800.000.00	46.67	6.000.000.00	100
1.17	Penyediaan alat tulis kantor (Kecamatan Cibiru)	54.566.700.00	945.000.00	1.73	49.395.600.00	90.52	52.290.600.00	95.83	52.290.600.00	95.83
1.18	Penyediaan alat tulis kantor (Kelurahan Palasari)	17.037.400.00	900.000.00	5.28	15.227.600.00	89.38	15.227.600.00	89.38	15.677.600.00	92.02
1.19	Penyediaan alat tulis kantor (Kelurahan Cipadung)	20.145.900.00	2.139.600.00	10.62	4.571.400.00	22.69	11.173.900.00	55.46	18.726.900.00	92.96
1.20	Penyediaan alat tulis kantor (Kelurahan Pasirbiru)	16.188.500.00	623.000.00	3.85	5.588.000.00	34.52	6.038.000.00	37.3	15.043.900.00	92.93
1.21	Penyediaan alat tulis kantor (Kelurahan Cisirupan)	16.152.700.00	1.978.200.00	12.25	4.564.700.00	28.26	7.397.900.00	45.8	15.834.500.00	98.03
1.22	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Kecamatan Cibiru)	57.392.299.00	5.850.000.00	10.19	28.765.000.00	50.12	34.492.000.00	60.1	48.116.500.00	83.84
1.23	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Kelurahan Palasari)	11.964.500.00	5.300.000.00	44.3	6.056.000.00	50.62	9.224.000.00	77.09	11.964.500.00	100
1.24	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Kelurahan Cipadung)	13.152.300.00	1.395.750.00	10.61	4.728.250.00	35.95	5.178.250.00	39.37	13.055.250.00	99.26
1.25	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Kelurahan Pasirbiru)	11.809.750.00	500.000.00	4.23	2.743.000.00	23.23	5.675.000.00	48.05	9.272.250.00	78.51
1.26	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Kelurahan Cisirupan)	11.992.250.00	1.375.550.00	11.47	1.778.100.00	14.83	3.032.150.00	25.28	11.992.100.00	100
1.27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Cibiru)	5.709.600.00	0.00	0	5.670.500.00	99.32	5.670.500.00	99.32	5.670.500.00	99.32
1.28	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Palasari)	5.220.650.00	0.00	0	1.915.500.00	36.69	3.376.500.00	64.68	5.188.500.00	99.38



Kecamatan Cibiru

1.29	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Cipadung)	5.014.400.00	1.047.500.00	20.89	1.773.700.00	35.37	1.773.700.00	35.37	4.956.100.00	98.84
1.30	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Pasirbiru)	4.227.900.00	986.000.00	23.32	986.000.00	23.32	1.486.000.00	35.15	4.064.100.00	96.13
1.31	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Cisarupan)	4.218.000.00	0.00	0	572.300.00	13.57	1.144.600.00	27.14	4.218.000.00	100
1.32	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Kecamatan Cibiru)	118.492.910.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	103.433.000.00	87.29
1.33	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Kelurahan Palasari)	3.180.600.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	3.005.000.00	94.48
1.34	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Kelurahan Cipadung)	10.950.500.00	0.00	0	968.000.00	8.84	968.000.00	8.84	10.593.000.00	96.74
1.35	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Kelurahan Pasirbiru)	19.144.600.00	968.000.00	5.06	0.00	0	0.00	0	18.970.400.00	99.09
1.36	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Kelurahan Cisarupan)	4.857.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	4.730.000.00	97.39
1.37	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan Cibiru)	35.409.740.00	0.00	0	13.634.500.00	38.5	13.634.500.00	38.5	34.776.200.00	98.21
1.38	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Palasari)	15.510.525.00	1.794.000.00	11.57	1.954.000.00	12.6	1.954.000.00	12.6	15.163.500.00	97.76
1.39	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Cipadung)	5.211.000.00	2.284.000.00	43.83	3.488.000.00	66.94	3.488.000.00	66.94	5.083.000.00	97.54
1.40	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Pasirbiru)	5.232.000.00	1.073.000.00	20.51	1.610.000.00	30.77	1.610.000.00	30.77	5.221.500.00	99.8
1.41	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Cisarupan)	5.058.400.00	230.200.00	4.55	460.200.00	9.1	913.800.00	18.07	5.058.400.00	100
1.42	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan (Kecamatan Cibiru)	7.316.000.00	776.000.00	10.61	1.940.000.00	26.52	3.104.000.00	42.43	6.156.000.00	84.14
1.43	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan (Kelurahan Palasari)	1.200.000.00	300.000.00	25	500.000.00	41.67	700.000.00	58.33	1.200.000.00	100
1.44	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan (Kelurahan Cipadung)	1.200.000.00	0.00	0	400.000.00	33.33	400.000.00	33.33	1.200.000.00	100
1.45	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan (Kelurahan Pasirbiru)	1.416.000.00	354.000.00	25	472.000.00	33.33	472.000.00	33.33	472.000.00	33.33



Kecamatan Cibiru

1.46	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan (Kelurahan Cisarupan)	1.236.000.00	206.000.00	16.67	309.000.00	25	824.000.00	66.67	1.236.000.00	100
1.47	Penyediaan makanan dan minuman (Kecamatan Cibiru)	68.000.000.00	5.465.000.00	8.04	8.660.000.00	12.74	18.110.000.00	26.63	40.279.000.00	59.23
1.48	Penyediaan makanan dan minuman (Kelurahan Palasari)	22.500.000.00	4.500.000.00	20	8.910.000.00	39.6	8.910.000.00	39.6	19.050.000.00	84.67
1.49	Penyediaan makanan dan minuman (Kelurahan Cipadung)	27.000.000.00	4.041.500.00	14.97	8.205.500.00	30.39	12.055.500.00	44.65	26.987.000.00	99.95
1.50	Penyediaan makanan dan minuman (Kelurahan Pasirbiru)	20.950.000.00	2.250.000.00	10.74	2.700.000.00	12.89	6.000.000.00	28.64	20.400.000.00	97.37
1.51	Penyediaan makanan dan minuman (Kelurahan Cisarupan)	24.996.000.00	700.000.00	2.8	3.915.000.00	15.66	15.290.000.00	61.17	24.992.000.00	99.98
1.52	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kecamatan Cibiru)	40.000.000.00	0.00	0	2.070.000.00	5.18	2.070.000.00	5.18	11.872.000.00	29.68
1.53	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran (Kecamatan Cibiru)	428.600.000.00	70.500.000.00	16.45	176.250.000.00	41.12	282.000.000.00	65.8	426.200.000.00	99.44
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
2.1	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor (Kecamatan Cibiru)	6.258.600.00	0.00	0	6.050.550.00	96.68	0.00	0	6.050.550.00	96.68
2.2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (Kecamatan Cibiru)	513.612.000.00	81.461.200.00	15.86	167.601.800.00	32.63	188.467.000.00	36.69	360.238.200.00	70.14
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
3.1	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur (Kecamatan Cibiru)	74.606.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	39.676.000.00	53.18
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
4.1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (Kecamatan Cibiru)	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan									
5.1	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan (Kecamatan Cibiru)	40.215.600.00	5.120.000.00	12.73	7.720.000.00	19.2	10.220.000.00	25.41	27.495.000.00	68.37
5.2	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan (Kelurahan Palasari)	9.000.000.00	0.00	0	0.00	0	3.148.000.00	34.98	8.000.000.00	88.89
5.3	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan (Kelurahan Cipadung)	8.980.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	8.980.000.00	100



Kecamatan Cibiru

5.4	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan (Kelurahan Pasirbiru)	4.300.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	3.800.000.00	88.37
5.5	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan (Kelurahan Cisurupan)	8.938.000.00	0.00	0	3.243.000.00	36.28	3.243.000.00	36.28	7.247.000.00	81.08
5.6	Kegiatan Pembinaan RT RW (Kecamatan Cibiru)	30.990.000.00	3.360.000.00	10.84	3.960.000.00	12.78	3.960.000.00	12.78	24.070.000.00	77.67
5.7	Kegiatan Pembinaan RT RW (Kelurahan Palasari)	389.200.000.00	80.700.000.00	20.73	147.300.000.00	37.85	252.800.000.00	64.95	388.200.000.00	99.74
5.8	Kegiatan Pembinaan RT RW (Kelurahan Cipadung)	410.790.000.00	34.900.000.00	8.5	168.500.000.00	41.02	268.700.000.00	65.41	410.790.000.00	100
5.9	Kegiatan Pembinaan RT RW (Kelurahan Pasirbiru)	311.150.000.00	25.500.000.00	8.2	127.500.000.00	40.98	178.500.000.00	57.37	310.750.000.00	99.87
5.10	Kegiatan Pembinaan RT RW (Kelurahan Cisurupan)	259.006.000.00	20.900.000.00	8.07	104.500.000.00	40.35	146.300.000.00	56.49	259.006.000.00	100
6	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum									
6.1	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan (Kelurahan Palasari)	389.028.500.00	64.906.000.00	16.68	170.267.600.00	43.77	264.017.600.00	67.87	389.017.600.00	100
6.2	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan (Kelurahan Cipadung)	431.170.000.00	84.412.300.00	19.58	185.662.300.00	43.06	290.762.300.00	67.44	431.162.300.00	100
6.3	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan (Kelurahan Pasirbiru)	396.639.491.00	62.500.000.00	15.76	169.975.000.00	42.85	263.725.000.00	66.49	394.894.500.00	99.56
6.4	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan (Kelurahan Cisurupan)	391.811.791.00	62.500.000.00	15.95	159.227.800.00	40.64	265.508.900.00	67.76	391.811.650.00	100
6.5	Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan (Kecamatan Cibiru)	142.545.400.00	30.647.000.00	21.5	64.397.000.00	45.18	102.532.000.00	71.93	142.532.000.00	99.99
6.6	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan (Kecamatan Cibiru)	28.831.550.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	28.391.000.00	98.47
Total Per Sasaran		5.280.952.081.00	713.659.177.00	13.51	1.944.333.065.00	36.82	2.922.465.926.00	55.34	4.894.415.524.00	92.68
Sasaran 2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan									
7	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan									
7.1	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan (Kecamatan Cibiru)	46.366.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	6.528.000.00	14.08
7.2	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan (Kelurahan Palasari)	7.077.000.00	0.00	0	0.00	0	5.668.000.00	80.09	5.668.000.00	80.09



Kecamatan Cibiru

7.3	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan (Kelurahan Cipadung)	7.450.000.00	0.00	0	0.00	0	4.625.000.00	62.08	7.450.000.00	100
7.4	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan (Kelurahan Pasirbiru)	2.150.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.800.000.00	83.72
7.5	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan (Kelurahan Cisarupan)	7.513.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	7.513.000.00	100
7.6	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan (Kecamatan Cibiru)	696.619.550.00	149.541.800.00	21.47	299.541.800.00	43	449.541.800.00	64.53	670.376.800.00	96.23
7.7	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan (Kelurahan Palasari)	210.160.000.00	17.660.000.00	8.4	98.360.000.00	46.8	140.160.000.00	66.69	210.160.000.00	100
7.8	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan (Kelurahan Cipadung)	263.150.000.00	42.500.000.00	16.15	106.250.000.00	40.38	173.876.000.00	66.07	263.126.000.00	99.99
7.9	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan (Kelurahan Pasirbiru)	187.950.000.00	30.000.000.00	15.96	77.250.000.00	41.1	122.250.000.00	65.04	187.300.000.00	99.65
7.10	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan (Kelurahan Cisarupan)	152.140.000.00	27.140.000.00	17.84	64.640.000.00	42.49	102.140.000.00	67.14	152.140.000.00	100
7.11	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan (Kecamatan Cibiru)	153.180.000.00	20.720.000.00	13.53	34.638.500.00	22.61	44.388.500.00	28.98	95.300.750.00	62.21
7.12	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan (Kelurahan Palasari)	121.500.000.00	19.000.000.00	15.64	35.150.000.00	28.93	61.750.000.00	50.82	120.750.000.00	99.38
7.13	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan (Kelurahan Cipadung)	134.300.000.00	22.500.000.00	16.75	47.700.000.00	35.52	85.500.000.00	63.66	132.500.000.00	98.66
7.14	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan (Kelurahan Pasirbiru)	95.150.000.00	9.750.000.00	10.25	30.750.000.00	32.32	50.250.000.00	52.81	94.500.000.00	99.32
7.15	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan (Kelurahan Cisarupan)	71.048.000.00	3.300.000.00	4.64	22.550.000.00	31.74	44.000.000.00	61.93	71.048.000.00	100
7.16	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial (Kecamatan Cibiru)	44.450.000.00	0.00	0	0.00	0	6.230.000.00	14.02	32.174.000.00	72.38
7.17	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial (Kelurahan Palasari)	4.938.000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	4.437.500.00	89.86



Kecamatan Cibiru

7.18	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial (Kelurahan Cipadung)	6.416.000.00	1.540.000.00	24	1.540.000.00	24	3.680.000.00	57.36	6.416.000.00	100
7.19	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial (Kelurahan Pasirbiru)	5.837.500.00	1.000.000.00	17.13	1.000.000.00	17.13	1.000.000.00	17.13	5.287.500.00	90.58
7.20	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial (Kelurahan Cisurupan)	5.207.500.00	0.00	0	4.857.500.00	93.28	4.857.500.00	93.28	4.857.500.00	93.28
7.21	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan (Kecamatan Cibiru)	10.156.250.00	10.156.250.00	100	10.156.250.00	100	10.156.250.00	100	10.156.250.00	100
7.22	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan (Kelurahan Palasari)	3.628.000.00	3.628.000.00	100	3.628.000.00	100	3.628.000.00	100	3.628.000.00	100
7.23	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan (Kelurahan Cipadung)	9.000.000.00	9.000.000.00	100	9.000.000.00	100	9.000.000.00	100	9.000.000.00	100
7.24	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan (Kelurahan Pasirbiru)	4.050.000.00	4.050.000.00	100	4.050.000.00	100	4.050.000.00	100	4.050.000.00	100
7.25	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan (Kelurahan Cisurupan)	3.152.500.00	3.152.500.00	100	3.152.500.00	100	3.152.500.00	100	3.152.500.00	100
Total Per Sasaran		2.252.589.300.00	374.638.550.00	16.63	854.214.550.00	37.92	1.329.903.550.00	59.04	2.109.319.800.00	93.64
Sasaran 3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat									
8	Program Pemberdayaan Kewilayahan									
8.1	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW (Kelurahan Palasari)	564.103.040.00	185.420.840.00	32.87	470.559.265.00	83.42	470.559.265.00	83.42	544.050.665.00	96.45
8.2	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW (Kelurahan Cipadung)	466.468.208.00	46.950.000.00	10.06	67.350.000.00	14.44	87.750.000.00	18.81	465.227.840.00	99.73
8.3	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW (Kelurahan Pasirbiru)	599.996.683.00	56.145.150.00	9.36	66.595.150.00	11.1	194.565.150.00	32.43	577.359.370.00	96.23
8.4	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW (Kelurahan Cisurupan)	499.880.759.00	23.919.300.00	4.79	23.919.300.00	4.79	72.044.300.00	14.41	492.305.480.00	98.48
8.5	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK (Kelurahan Palasari)	50.000.000.00	19.970.000.00	39.94	26.620.000.00	53.24	19.970.000.00	39.94	49.982.600.00	99.97
8.6	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK (Kelurahan Cipadung)	50.000.000.00	9.031.300.00	18.06	9.031.300.00	18.06	9.031.300.00	18.06	49.991.050.00	99.98
8.7	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK (Kelurahan Pasirbiru)	50.005.300.00	2.900.000.00	5.8	2.900.000.00	5.8	8.200.000.00	16.4	39.170.100.00	78.33
8.8	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK (Kelurahan Cisurupan)	49.999.800.00	21.836.000.00	43.67	21.836.000.00	43.67	22.346.000.00	44.69	49.034.650.00	98.07



Kecamatan Cibiru

8.9	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang taruna (Kelurahan Palasari)	50.000.000.00	27.347.125.00	54.69	27.347.125.00	54.69	27.347.125.00	54.69	48.596.125.00	97.19
8.10	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang taruna (Kelurahan Cipadung)	50.000.000.00	6.592.300.00	13.18	6.592.300.00	13.18	6.592.300.00	13.18	48.788.300.00	97.58
8.11	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang taruna (Kelurahan Pasirbiru)	50.008.014.00	3.100.000.00	6.2	14.476.000.00	28.95	14.476.000.00	28.95	47.021.800.00	94.03
8.12	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang taruna (Kelurahan Cisarupan)	50.000.050.00	9.905.300.00	19.81	9.905.300.00	19.81	12.905.300.00	25.81	49.995.050.00	99.99
8.13	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM (Kelurahan Palasari)	50.000.000.00	2.075.100.00	4.15	2.075.100.00	4.15	2.075.100.00	4.15	48.397.690.00	96.8
8.14	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM (Kelurahan Cipadung)	50.000.000.00	0.00	0	4.100.000.00	8.2	4.100.000.00	8.2	49.471.250.00	98.94
8.15	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM (Kelurahan Pasirbiru)	50.001.000.00	0.00	0	0.00	0	16.226.000.00	32.45	39.540.300.00	79.08
8.16	Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM (Kelurahan Cisarupan)	50.000.100.00	2.814.000.00	5.63	6.652.500.00	13.3	6.652.500.00	13.3	49.704.100.00	99.41
9	Program Perlindungan Sosial Bencana									
9.1	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (Kecamatan Cibiru)	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
9.2	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (Kelurahan Palasari)	49.984.000.00	0.00	0	33.000.000.00	66.02	49.984.000.00	100	49.984.000.00	100
9.3	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (Kelurahan Cipadung)	49.984.000.00	0.00	0	33.000.000.00	66.02	49.984.000.00	100	49.984.000.00	100
9.4	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (Kelurahan Pasirbiru)	49.984.000.00	0.00	0	24.970.000.00	49.96	49.984.000.00	100	49.984.000.00	100
9.5	Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (Kelurahan Cisarupan)	49.984.000.00	0.00	0	24.288.000.00	48.59	49.984.000.00	100	49.984.000.00	100
Total Per Sasaran		2.930.398.954.00	418.006.415.00	14.26	875.217.340.00	29.87	1.174.776.340.00	40.09	2.848.572.370.00	97.21
Grand Total		10.463.940.335.00	1.506.304.142.00	14.40	3.673.764.955.00	35.11	5.427.145.816.00	51.87	9.852.307.694.00	94.15



PERJANJIAN KINERJA



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Drs. DIDIN DIKAYUANA**
Jabatan : **CAMAT CIBIRU**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP**
Jabatan : **WALI KOTA BANDUNG**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 16 Oktober 2020

PIHAK KEDUA


H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP

PIHAK PERTAMA


Drs. DIDIN DIKAYUANA
NIP. 19661027 199301 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : KECAMATAN CIBIRU
TAHUN : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cibiru	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	Angka	82.21
		Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindak lanjuti	%	100
2.	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.433.879.149,00	APBD Kota Bandung 2020
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	519.870.600,00	APBD Kota Bandung 2020
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	74.606.000,00	APBD Kota Bandung 2020
4	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1.472.569.600,00	APBD Kota Bandung 2020
5	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1.780.026.733,00	APBD Kota Bandung 2020
6	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.252.589.300,00	APBD Kota Bandung 2020
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	2.730.462.955,00	APBD Kota Bandung 2020
8	Program Perlindungan Sosial Bencana	199.936.000,00	APBD Kota Bandung 2020
TOTAL		10.463.940.337,00	

Bandung, 16 Oktober 2020

PIHAK KEDUA

H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP

PIHAK PERTAMA

DIDI NILAYUANA
NIP. 19661027 199301 1 002